



SALINAN

BUPATI BANDUNG  
PROVINSI JAWA BARAT  
PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 131 TAHUN 2025

TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

- Menimbang : bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan Pasal 367 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Daerah Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Undang-Undang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Kabupaten Bandung Di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7040);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara, Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Penganggaran Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 9)
17. Peraturan Bupati Kabupaten Bandung Nomor 59 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 152 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 (Berita daerah Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor 59);
18. Peraturan Bupati Bandung Nomor 93 Tahun 2025 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 Nomor 93);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah Kabupaten yang selanjutnya disebut Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh Camat.
7. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
8. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran PD.
9. Rencana Strategis Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renstra PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
10. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.
11. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahunan.

12. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program, kegiatan dan sub kegiatan suatu PD, serta pagu anggaran sementara yang didasarkan atas Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan PPAS APBD.
13. Tujuan adalah sesuatu kondisi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) tahunan.
14. Sasaran adalah rumusan kondisi yang menggambarkan tercapainya tujuan, berupa hasil pembangunan daerah atau Perangkat Daerah yang diperoleh dari pencapaian hasil (*outcome*) program PD.
15. Program adalah penjabaran kebijakan Perangkat Daerah dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil terukur sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
16. Kegiatan adalah serangkaian aktivitas pembangunan yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah untuk menghasilkan keluaran (*output*) dalam rangka mencapai hasil (*outcome*) suatu program.
17. Sub Kegiatan adalah bentuk aktivitas dan layanan dari kegiatan dalam pelaksanaan kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

## BAB II PERUBAHAN RENJA PD

### Pasal 2

Perubahan Renja PD adalah Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah yang memuat penjabaran dari Perubahan RKPD Tahun 2025 dan berpedoman pada Rancangan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029.

### Pasal 3

Dokumen Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sekurang-kurangnya memuat :

- a. Latar belakang dan Dasar Hukum;
- b. Hasil evaluasi Renja PD tahun lalu;
- c. Tujuan dan sasaran Perangkat Daerah;
- d. Rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah;
- e. Penutup; dan

- f. Lampiran program/ kegiatan/ sub kegiatan berdasarkan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Pasal 4

- (1) Perubahan Renja PD dilaksanakan untuk melakukan penyesuaian berdasarkan Perubahan RKPD Tahun 2025.
- (2) Perubahan Renja PD Tahun 2025 dilaksanakan untuk :
  - a. Penyesuaian target kinerja, pagu indikatif, lokasi dan kelompok sasaran program/kegiatan/sub kegiatan;
  - b. Laporan pengendalian terhadap pelaksanaan Renstra PD tahun berkenaan; dan
  - c. Menjaga konsistensi target capaian indikator kinerja Perangkat Daerah, dengan melakukan penyesuaian nomenklatur sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis Perangkat Daerah Tahun 2025.

Pasal 5

- (1) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dijadikan salah satu dasar penyusunan perubahan rencana kerja dan anggaran (RKA) PD.
- (2) Perubahan Renja PD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, menjadi dasar penyusunan laporan evaluasi hasil Renstra PD.

BAB III

KAIDAH PELAKSANAAN DAN PELAPORAN RENJA PD

Pasal 6

Kaidah Perubahan Renja PD meliputi;

- (1) Semua ketetapan perubahan indikator kinerja dan pagu indikatif pendanaan menjadi tanggungjawab PD sesuai dengan tugas dan fungsi PD.
- (2) Target kinerja dan pagu indikatif dapat berubah menyesuaikan dengan perubahan KUA-PPAS yang telah disepakati bersama DPRD.
- (3) Perubahan target kinerja dan pagu indikatif sebagaimana ayat (2), dilengkapi dengan berita acara atau risalah rapat antara PD dengan DPRD.
- (4) Perubahan-perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) dilaporkan pada saat penyampaian laporan evaluasi hasil Renja PD triwulan IV tahun berkenaan.

## BAB IV PENETAPAN PERUBAHAN RENJA PD

### Pasal 7

Penetapan Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 mengacu pada :

- a. Surat Edaran Bupati Bandung tentang Penyusunan Perubahan Renja PD.
- b. penetapan Perubahan RKPD Tahun 2025; dan
- c. hasil evaluasi pelaksanaan Renja PD Triwulan I tahun berjalan.

### Pasal 8

Ketentuan lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan Renja PD Tahun 2025 sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 sampai dengan Pasal 7 tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

## BAB V PENGENDALIAN DAN EVALUASI

### Pasal 9

- (1) Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD sesuai ketentuan perundang-undangan.
- (2) Kepala PD melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan Perubahan Renja PD yang meliputi pelaksanaan program, kegiatan, sub kegiatan dan capaian kinerja yang menjadi target PD dan kebijakan perubahan Renja PD.
- (3) Kepala PD melaporkan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD periode pelaporan triwulan IV yang disampaikan kepada Bupati melalui Kepala PD yang membidangi perencanaan pembangunan, penelitian dan pengembangan daerah untuk diverifikasi paling lambat minggu pertama bulan Januari tahun berikutnya.
- (4) Ketentuan mengenai tata cara pelaporan hasil evaluasi terhadap Perubahan Renja PD mempedomani ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan perundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang  
pada tanggal 26 Juni 2025

BUPATI BANDUNG,

ttd

MOCHAMMAD DADANG SUPRIATNA

Diundangkan di Soreang  
pada tanggal 26 Juni 2025

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN BANDUNG,

ttd

CAKRA AMIYANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025 NOMOR 131

salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BAGIAN HUKUM**



**YANA ROSMIANA, S.H.M.H**

**Pembina Tk.I**

**NIP. 196901011999012001**

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI  
BANDUNG  
NOMOR 131 TAHUN 2025  
TENTANG  
PERUBAHAN RENCANA KERJA  
KECAMATAN PASIRJAMBU KABUPATEN  
BANDUNG TAHUN 2025

PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU  
KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2025



PEMERINTAH  
KABUPATEN BANDUNG

# Perubahan RENCANA KERJA RENJA Tahun 2025



KECAMATAN PASIRJAMBU



## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT serta atas segala limpahan Rahmat Taufik Hidayah dan Inayahnya, Alhamdulillah kami dapat menyelesaikan Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025. Laporan ini disusun sebagai Program Kerja Kecamatan Pasirjambu dalam kurun waktu Tahun 2025.

Rencana Kerja adalah dokumen perencanaan untuk periode 1 (satu) Tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 mengacu pada kerangka arah kebijakan yang dirumuskan dalam Renja Pembangunan Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 yang telah ditetapkan oleh Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023, dan juga merupakan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Oleh karena itu Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 dapat dikerjakan dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting Kecamatan Pasirjambu, evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026.

Akhir kata kami ucapkan terima kasih kepada semua pihak terutama Dinas / Instansi terkait atas bantuan, bimbingan dan partisipasinya hingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Dokumen Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 ini, semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda dan semoga laporan ini bermanfaat bagi kita semua, Amiin.

Pasirjambu, Juni 2025  
CAMATI PASIRJAMBU,  
  
**NIA KANIA, S.PT., M.I.L**  
NIP. 19780927 201001 2 008



**DAFTAR GAMBAR DAN TABEL**

			Halaman
Gambar	1.1	Kedudukan Renja dalam Manajemen Strategis Sektor Publik	2
Gambar	2.1	Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026	24
Gambar	2.2	Grafik Penilaian AKIP Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024	30
Gambar	2.3	Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023-2024 dan Capaian Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2024	29
Gambar	2.4	Perbandingan Realisasi BMD Dalam Kondisi Baik Tahun 2023-2024 dan Capaian Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Terhadap Target Target Tahun 2024	32
Gambar	2.5	Grafik Kondisi Barang Milik Daerah Tahun 2024	33
Gambar	2.6	Capaian Nilai IKM dan Perbandingan Capaian Nilai IKM	35
Gambar	2.7	Informasi Detail Responden Dalam Penilaian IKM Tahun 2023 dan IKM Tahun 2024 Kecamatan Pasirjambu	35
Gambar	2.8	Capaian Persentasi Desa Beradministrasi Baik Tahun 2024	38
Gambar	2.9	Analisis SWOT Kewilayahan Kecamatan Pasirjambu	40
Gambar	3.1	Casecading RPJMD Terhadap Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	54
Gambar	4.1	Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kecamatan Pasirjambu	75
Gambar	4.2	Rencana Program Yang Akan Dilaksanakan Tahun 2025	76
Tabel	2.1	Hasil Pengukuran Atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 dan Perbandingan Capaian Antara Tahun 2023 dan Tahun 2024	9
Tabel	2.2 – TC.29	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung	10-15
Tabel	2.3	Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat	17-24
Tabel	2.4- TC.30	Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung	26-27
Tabel	2.5	Kriteria Penilaian Capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP)	28
Tabel	2.6	Jenis Unsur Pelayanan Yang Diakomodir Pada e-SKM Tahun 2023 dan Tahun 2024	36
Tabel	2.7	Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan	39



		Pasirjambu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah	
Tabel	2.8 - TC.31	Review Terhadap Rancangan Akhir Perubahan RKPD Tahun 2024 Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung	42-48
Tabel	2.9 - TC.32	Usulan Program dan Kegiatan Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025 Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung	49
Tabel	3.1	Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025	51
Tabel	3.2	Cascading RPJMD terhadap Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	54
Tabel	3.3	Matrik Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025	56
Tabel	3.4	Tujuan, Sasaran, Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu	58-65
Tabel	3.5	Rancangan Akhir Rencana Kerja Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025	66
Tabel	3.6 - TC.33	Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2026 Kabupaten Bandung	67-74
Tabel	4.1	Usulan Program dan Kegiatan Serta Pendanaan Tahun 2025	77-80
<b>Lampiran – Lampiran :</b>			
Formulir	E.70	Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah Kabupaten Bandung	92-93

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

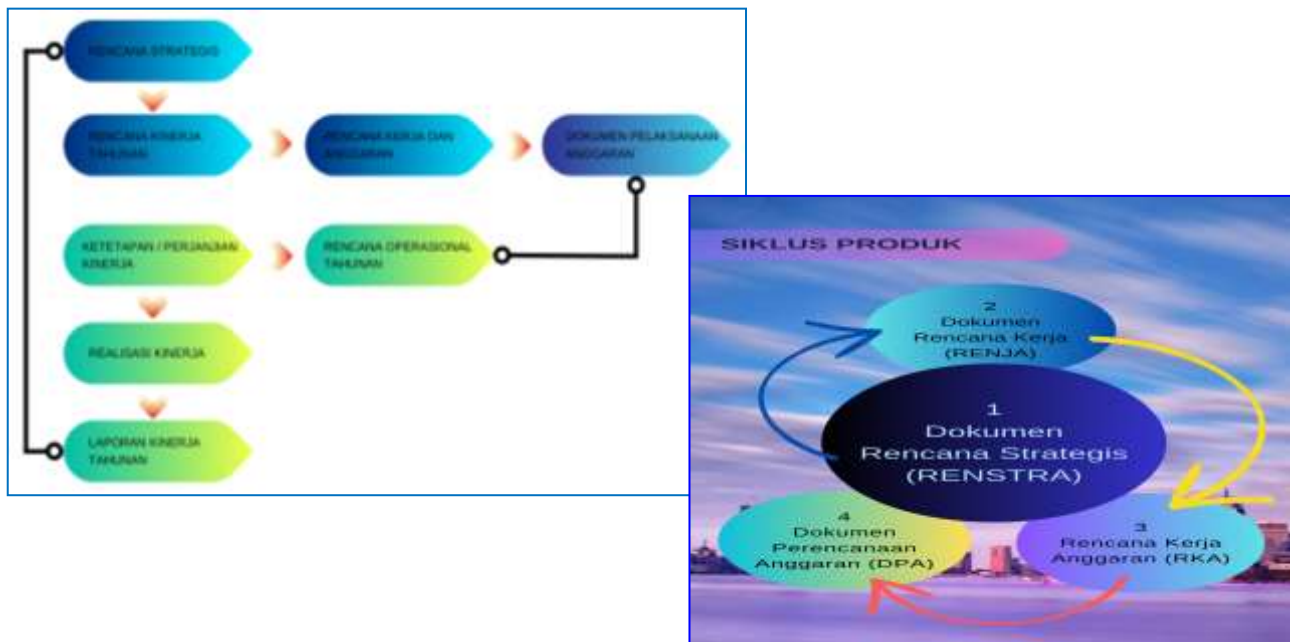
Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 merupakan amanat Undang–Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang–Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Evaluasi Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu merupakan penjabaran terhadap rencana pelaksanaan program dan kegiatan Kecamatan Pasirjambu pada tahun  $n+1$  yaitu tahun 2025 yang berpedoman pada Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023 tentang Renja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Bandung Tahun 2025 dan juga merupakan penyempurnaan dari Rancangan Renja berdasarkan Pasal 138 ayat 2 Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 86 Tahun 2017. Perumusan Rencana Kerja dimaksudkan untuk mempertajam program, kegiatan, dan pagu indikatif Kecamatan Pasirjambu dalam rangka melaksanakan tugasnya yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pasirjambu.

Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu memuat program, kegiatan, sub kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai dengan indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Kecamatan yang diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah *juncto* Peraturan Bupati Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung. Berdasarkan Pasal 13 ayat 2 Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 bahwa Renja Perangkat Daerah Berpedoman Kepada Renstra Perangkat Daerah dan RKPD. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dokumen Renja adalah penjabaran dari Dokumen Renstra yang berpedoman pada RKPD Tahun 2025.

**Gambar 1.1**

**Kedudukan Renja dalam Manajemen Strategis Sektor Publik**



Dari gambar 1.1 di atas, Penyusunan rencana kinerja meliputi Penyusunan Perubahan sasaran (uraian, indikator, dan target) yang ingin dicapai dalam tahun bersangkutan, serta program, kegiatan yang direncanakan mendukung pencapaian tujuan dan sasaran. Sasaran yang dimaksud dalam rencana kinerja ini adalah sasaran sebagaimana dimuat dalam Dokumen Renstra, selanjutnya diidentifikasi sasaran mana yang akan diwujudkan pada tahun bersangkutan beserta indikator dan rencana tingkat capaiannya (targetnya).

Selanjutnya rencana kinerja yang disusun menjadi dasar dalam Penyusunan Perubahan Renja dan anggaran (RKA). Setelah anggaran ditetapkan melalui mekanisme pembahasan antara pemerintah dengan DPRD (menjadi dokumen pelaksanaan anggaran / DPA), maka instansi pemerintah membuat rencana operasional, dan selanjutnya membuat perjanjian kinerja (Penetapan Kinerja) dengan atasannya langsung, di mana penetapan kinerja ini akan digunakan sebagai dasar dalam melakukan evaluasi kinerja.

Penetapan kinerja merupakan pedoman dasar bagi Aparatur Sipil Negara untuk melaksanakan kinerja apa yang akan dilakukan di tahun berjalan, sasaran target serta anggaran yang dapat diserap untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan kinerja yang diperjanjikan.

Pada akhir periode dilakukan pengukuran kinerja untuk selanjutnya dilaporkan dalam Laporan Kinerja Tahunan Instansi Pemerintah (LKIP). Dokumen LKIP ini akan menjelaskan kesesuaian antara kinerja yang diperjanjikan dengan realisasi kinerja serta penyerapan anggaran. Evaluasi kerja pada Dokumen LKIP menjadi hal yang penting

untuk menyusun rencana aksi selanjutnya yang mendukung pelaksanaan Renstra di tahun mendatang.

Proses Penyusunan PerubahanRenja didasarkan pada penjaringan aspirasi yang diformulasikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tahunan dan memperhatikan hasil evaluasi pelaksanaan pembangunan daerah pada tahun sebelumnya. Lebih lanjut Penyusunan PerubahanDokumen RKPD dan Renja PD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan Pemerintah Provinsi maupun Pemerintah Pusat, hal ini sejalan dengan Pasal 2 (dua) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa Daerah Kabupaten dan Kota merupakan bagian dari Provinsi serta mempunyai hubungan wewenang, keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya.

Musrenbang berfungsi sebagai forum untuk menghasilkan kesepakatan antar pelaku pembangunan tentang Rancangan Akhir RKPD dan Rancangan Akhir Perubahan Renja PD, yang menitikberatkan pada pembahasan untuk sinkronisasi sasaran, arah kebijakan, program dan kegiatan PD Rencana serta aspirasi masyarakat dalam pencapaian tujuan pembangunan Kabupaten Bandung.

Sebagai Dokumen resmi Pemerintah Daerah, Renja PD yang dilanjutkan dengan Renja PD mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan. Oleh karena itu RKPD dan Renja PD berfungsi menjabarkan rencana strategis kedalam rencana regional dengan memuat arah kebijakan pembangunan, prioritas pembangunan, Rancangan Akhir Perubahankerangka ekonomi daerah dan program kegiatan Perangkat Daerah (PD). Sebagai rencana operasional, RKPD merupakan pedoman dalam Penyusunan PerubahanKebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara dan APBD.

## **1.2. Landasan Hukum**

Peraturan perundang-undangan yang mendasari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Tahun 2025 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);



3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari APBN;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 Tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Renja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

16. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050 – 5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2009 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Barat;
18. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Nomor 4);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 27 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bandung Tahun 2016-2036 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 27);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 14 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bandung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 7);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2021 Nomor 9);
23. Peraturan Bupati Bandung Nomor 1 Tahun 2022 tentang Kedudukan dan Susunan Perangkat Daerah (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 1);
24. Peraturan Bupati Bandung Nomor 39 Tahun 2022 tentang Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Kecamatan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 39);
25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 124 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2021 – 2026 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2022 Nomor 124);
26. Peraturan Bupati Bandung Nomor 75 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2023 Nomor 75);

27. Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan dari Bupati Bandung Kepada Camat.
28. Keputusan Bupati Bandung Nomor : 050 / Kep.107-Bappelitbangda / 2023 tentang Tim Penyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah.

### **1.3. Maksud dan Tujuan**

*Maksud* dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 dimaksudkan untuk :

1. Menyempurnakan Rancangan Renja Kecamatan Pasirjambu;
2. Memastikan rancangan perencanaan, pemilihan program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan arah kebijakan dalam pencapaian visi dan misi pembangunan daerah yang tertuang dalam RPJMD, Renstra, dan RKPD;
3. Sebagai alat ukur untuk mengukur capaian kinerja Kecamatan Pasirjambu.

*Tujuan* dari Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 bertujuan untuk :

1. Mengevaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2024 sebagai bahan Penyusunan Perubahan Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025;
2. Merumuskan rancangan program, kegiatan dan sub kegiatan, termasuk indikator kinerja, target kinerja Kecamatan Pasirjambu yang akan dilaksanakan pada Tahun 2025.
3. Merancang acuan perencanaan, pelaksanaan dan pertanggungjawaban Camat Pasirjambu dalam penyelenggaraan Pemerintahan Kecamatan.

### **1.4. Sistematika Penulisan**

Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 disusun mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Akhir Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pasal 126 Perangkat Daerah menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. dengan sistematika sebagai berikut :

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Pengertian, proses penyusunan, keterkaitan antara Renja PD Kecamatan Pasirjambu dengan Dokumen RKPD, Renstra Kecamatan Pasirjambu dengan Renja K/L dan Renja Provinsi serta tindak lanjut dengan proses Penyusunan PerubahanRAPBD

### **1.2 Landasan Hukum**

Penjelasan UU, PP, PERDA dan Peraturan lain yang mengatur SOTK, kewenangan PD, serta pedoman yang dijadikan acuan

### **1.3 Maksud dan Tujuan**

Penjelasan maksud dan tujuan dari Penyusunan PerubahanRenja

### **1.4 Sistematika Penulisan**

## **BAB II HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PASIRJAMBU TAHUN LALU**

### **2.1 Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun Lalu dan Capaian Renstra Kecamatan Pasirjambu.**

Kajian terhadap hasil evaluasi pelaksanaan renja Kecamatan Pasirjambu tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (n-1), mengacu pada APBD tahun berjalan, dikaitkan dengan pencapaian target Renstra Kecamatan Pasirjambu berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu tahun-tahun sebelumnya (Sajikan Tabel T-C.29 (PMDN 86/17)

### **2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu** Kajian terhadap capaian kinerja pelayanan Kecamatan Pasirjambu berdasarkan indikator kinerja yang sudah ditentukan dalam NSPK dan SPM maupun terhadap IKK sesuai dengan PP nomor 6 tahun 2008, ( Sajikan Tabel T-C.30).

### **2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasirjambu**

### **2.4 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD** (Lampirkan Tabel T-C.31)

### **2.5 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat** (Sajikan Tabel T-C.32)

## **BAB III TUJUAN DAN SASARAN KECAMATAN PASIRJAMBU**

### **3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional**

Penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional yang terkait tupoksi Kecamatan Pasirjambu

### **3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Kecamatan Pasirjambu**

Perumusan tujuan dan sasaran didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja renstra Kecamatan Pasirjambu

### **3.3 Program dan Kegiatan**

- a. Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap perumusan program dan kegiatan ( *misal : pencapaian visi misi kepala daerah, pencapaian sdgs, pencapaian NSPK dan SPM, pengentasan kemiskinan, pengembangan daerah terisolir, dst*)
- b. Uraian garis besar mengenai rekapitulasi program dan kegiatan yang meliputi :
  - *Jumlah program dan jumlah kegiatan*
  - *Sifat penyebaran lokasi program dan kegiatan*
  - *Total kebutuhan dana / pagu indikatif yang dirinci menurut sumber pendanaannya*
- c. Penjelasan jika rumusan program dan kegiatan tidak sesuai dengan Renstra yang menjadi bahan Rancangan Akhir Perubahan RKPDP baik jenis program / kegiatan, pagu indikatif maupun keduanya. (Sajikan Tabel T-C.33)

## **BAB IV RENJA DAN PENDANAAN**

## **BAB V PENUTUP**

Menjelaskan catatan-catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam pelaksanaannya, kaidah-kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

### **Lampiran-Lampiran**

Berisi SK Tim Penyusun Renja, dan lampiran-lampiran lainnya.

**BAB II**

**HASIL EVALUASI RENJA KECAMATAN PASIRJAMBU TAHUN LALU**

**2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2023 dan Capaian Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024**

Dalam pelaksanaan Renja Kecamatan Pasirjambu di Tahun 2023 dapat mencapai target baik secara kinerja maupun secara serapan anggaran. Kecamatan Pasirjambu pada Renja Tahun 2023 menganggarkan sebesar Rp. 4.816.346.349,00 dan terealisasi sebesar Rp. 4.519.219.111,00 atau 93,83%. Anggaran tersebut digunakan untuk melaksanakan 6 Program yang terdiri dari : 15 Kegiatan dan 40 Sub Kegiatan yang difokuskan pada 3 Target Sasaran Utama. Adapun data capaian kinerja Tahun 2023, tersaji pada tabel berikut ini :

**Tabel 2.1.**

**Hasil Pengukuran atas Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 dan Perbandingan Capaian Antara Tahun 2023 dan Tahun 2024**

SASARAN RPJMD	TUJUAN PD	INDIKATOR TUJUAN	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TAHUN 2023		TAHUN 2024		PERSENTASE CAPAIAN TAHUN 2024	PERSENTASE PERTUMBUHAN CAPAIAN ANTARA 2023 DAN 2024
					TARGET	REALISASI	TARGET	REALISASI		
Meningkatnya Kualitas e-govt melalui peningkatan kualitas kinerja, aparatur, tata kelola pemerintahan dan penyelenggaraan pelayanan publik ( Misi 4, Tujuan 1, Sasaran 1 )	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	68,45	73,80	69,00	80,40	116,52	Naik (8,94%)
				Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	98,50	93,15	98,50	99,96	101,48	Naik (7,31%)
	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	85,00	90,87	86,00	91,70	106,63	Naik (0,91%)
				Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Persentase Desa Beradministrasi Baik	65,50	73,50	66,00	75,10	113,79

*Rata - Rata Capaian* =  $438,42\% : 4 = 109,60\%$   
*Rata - Rata Pertumbuhan* =  $19,34\%$

Dari Tabel 2.1 diatas dapat disimpulkan bahwa rata-rata capaian Kecamatan Pasirjambu terhadap target sasaran strategis sebesar 109,60%. Pertumbuhan terjadi pada capaian Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dan Persentase BMD Dalam Kondisi Baik. Meskipun rata-rata capaian diatas 100% namun ada 2 (dua) Indikator yang persentase capaiannya masih nilai prediksi (perkiraan) dikarenakan masih dalam tahap proses penilaian oleh Tim diantaranya : 1. Indikator Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM), dan 2. Indikator Persentase Desa Beradministrasi Baik.



**Tabel 2.2 - TC.29  
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan  
Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2024 Kabupaten Bandung**

Nama Perangkat Daerah : KECAMATAN PASIRJAMBU

Kode Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan	Urusan / Bidang Daerah dan Program / Kegiatan / Sub kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) Kegiatan (Output) dan Subkegiatan	Target Kinerja Capaian Program Renstra PD Tahun (2021-2026)		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2023		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (s/d Juli Tahun 2024)						Target Program dan Kegiatan Renja Perangkat Daerah Tahun 2025		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan (2025)			
			1	2	3	4	5	6	7	8 = (7/6)	9	10 = (5+7+9)	11 = (10/4)					
7 01 1 0 0	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. NILAI AKIP 2. PERSENTASE BMD DALAM KONDISI BAIK	70,00 98,50	Point Persen	73,80 93,15	Point Persen	69,00 98,50	Point Persen	80,40 99,96	Point Persen	116,52 101,48	Point Persen	69,50 98,50	Point Persen	Point Persen	Point Persen	Point Persen	
		1. Nilai AKIP	70,00	Point	73,80	Point	69	Point	80,40	Point	116,52	Point	69,50	Point	Point	Point	Point	
7 01 1 2.01 0	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen sesuai dengan perencanaan dan evaluasi	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,00	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
7 01 1 2.01 0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	24	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	6	Dokumen	100,00	Persen	6	Dokumen	18	Dokumen	75,00	Persen
7 01 1 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	12	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	Persen	1	Dokumen	7	Dokumen	58,33	Persen
7 01 1 2.01 0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	16	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	Persen	3	Dokumen	11	Dokumen	68,75	Persen
7 01 1 2.01 0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100,00	Persen	1	Dokumen	5	Dokumen	62,50	Persen
7 01 1 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	12	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	3	Dokumen	100,00	Persen	3	Dokumen	9	Dokumen	75,00	Persen
7 01 1 2.01 0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	15	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	Persen	4	Laporan	10	Laporan	66,67	Persen
7 01 1 2.01 0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah																
7 01 1 2.01 0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sekbral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen									1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	Persen
7 01 1 2.01 0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sekbral Daerah	Jumlah Data Statistik Sekbral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data									1	Data	1	Data	100,00	Persen
7 01 1 2.02 0	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase ketersediaan dokumen anggaran/ keuangan yang diselesaikan tepat waktu	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,00	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
7 01 1 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima Gaji dan Tunjangan ASN	60	Orang / Bulan	12	Orang / Bulan	12	Orang / Bulan	12	Orang / Bulan	100,00	Persen	12	Orang / Bulan	36	Orang / Bulan	60,00	Persen
7 01 1 2.02 0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	10	Laporan	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Laporan	100,00	Persen	2	Laporan	6	Laporan	60,00	Persen
7 01 1 2.02 0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan / Semesteran SKPD	20	Laporan	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Laporan	100,00	Persen	4	Laporan	12	Laporan	60,00	Persen
7 01 1 2.02 0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	20	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100,00	Persen	4	Dokumen	12	Dokumen	60,00	Persen



7	01	1	2.05	0	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata capaian SKP ASN</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>		<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>				
7	01	1	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		Paket		Paket		Paket	#DIV/0!	Persen		Paket	0	Paket	#DIV/0!	Persen
7	01	1	2.05	0005	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	9	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	Persen	1	Dokumen	3	Dokumen	33,33	Persen
7	01	1	2.05	0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Orang		Orang		Orang		Orang	#DIV/0!	Persen	0	Orang	0	Orang	-	Persen
7	01	1	2.05	0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang		Orang		Orang		Orang	#DIV/0!	Persen	0	Orang	0	Orang	-	Persen
7	01	1	2.06	0	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase rata-rata pemenuhan administrasi umum perangkat daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	1	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik / Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	60	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100,00	Persen	12	Paket	36	Paket	60,00	Persen
7	01	1	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30	Paket	6	Paket	6	Paket	6	Paket	100,00	Persen	6	Paket	18	Paket	60,00	Persen
7	01	1	2.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	50	Paket	10	Paket	10	Paket	10	Paket	100,00	Persen	10	Paket	30	Paket	60,00	Persen
7	01	1	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	100	Paket	20	Paket	20	Paket	20	Paket	100,00	Persen	20	Paket	60	Paket	60,00	Persen
7	01	1	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	60	Paket	12	Paket	12	Paket	12	Paket	100,00	Persen	12	Paket	36	Paket	60,00	Persen
7	01	1	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Persen	12	Laporan	36	Laporan	60,00	Persen
7	01	1	2.08	0	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	1	2.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	0	Laporan		Laporan		Laporan		Laporan	#DIV/0!	Lembar	0	Laporan	0	Laporan	#DIV/0!	Persen
7	01	1	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Persen	12	Laporan	36	Laporan	60,00	Persen
7	01	1	2.08	0003	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100,00	Persen	12	Laporan	36	Laporan	60,00	Persen
						<b>2. Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik</b>	<b>98,50</b>	<b>Point</b>	<b>73,80</b>	<b>Point</b>	<b>69,00</b>	<b>Point</b>	<b>80,40</b>	<b>Point</b>	<b>116,52</b>	<b>Point</b>	<b>98,50</b>	<b>Point</b>		<b>Point</b>		<b>Point</b>
7	01	1	2.03	0	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	1	2.03	0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	1	Laporan	3	Laporan	75,00	Persen
7	01	1	2.07	0	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik</b>	<b>98,50</b>	<b>Point</b>	<b>98,50</b>	<b>Point</b>	<b>98,50</b>	<b>Point</b>	<b>93,15</b>	<b>Point</b>	<b>94,57</b>	<b>Point</b>	<b>98,50</b>	<b>Point</b>	<b>98,50</b>	<b>Point</b>	<b>93,17</b>	<b>Point</b>
7	01	1	2.07	5	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	15	Unit	3	Jenis	3	Jenis	3	Unit	100,00	Jenis	3	Unit	9	Unit	60,00	Persen

7	01	1	2.09	0	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik</b>	<b>98,50</b>	<b>Point</b>	<b>98,50</b>	<b>Point</b>	<b>98,50</b>	<b>Point</b>	<b>93,15</b>	<b>Point</b>	<b>94,57</b>	<b>Point</b>	<b>98,50</b>	<b>Point</b>	<b>91,77</b>	<b>Point</b>	<b>93,17</b>	<b>Point</b>
7	01	1	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	31	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100,00	Persen	7	Unit	17	Unit	54,84	Persen
7	01	1	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	31	Unit	5	Unit	5	Unit	5	Unit	100,00	Persen	5	Unit	15	Unit	48,39	Persen
7	01	1	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	10	Unit	2	Unit	2	Unit	2	Unit	100,00	Persen	2	Unit	6	Unit	60,00	Persen
7	01	1	2.09	0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/ Direhabilitasi	2	Unit		Unit		Unit		Unit	#DIV/0!	Persen	0	Unit	0	Unit	-	Persen
						<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	<b>88,00</b>	<b>Point</b>	<b>90,87</b>	<b>Point</b>	<b>86,00</b>	<b>Point</b>	<b>91,70</b>	<b>Point</b>	<b>106,63</b>	<b>Point</b>	<b>87,00</b>	<b>Point</b>		<b>Point</b>		<b>Point</b>
7	01	2	0	0	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	<b>88,00</b>	<b>Point</b>	<b>90,87</b>	<b>Point</b>	<b>86,00</b>	<b>Point</b>	<b>91,70</b>	<b>Point</b>	<b>106,63</b>	<b>Point</b>	<b>87,00</b>	<b>Point</b>		<b>Point</b>		<b>Point</b>
7	01	2	2.03	0	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	2	2.03	0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	Persen	1	Dokumen	3	Dokumen	75,00	Persen
7	01	2	2.03	0002	Pelaksanaan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Pelayanan Umum yang Melibatkan Pihak Swasta																	
7	01	2	2.04	0	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang dilaksanakan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	2	2.04	1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah dokumen non perizinan usaha yang dilaksanakan	8	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	1	Dokumen	50,00	Persen	1	Dokumen	4	Dokumen	50,00	Persen
7	01	2	2.04	3	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah laporan pelaksanaan kewenangan lain yang dilimpahkan	60	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	3	Laporan	100,00	Persen	27	Laporan	33	Laporan	55,00	Persen
						<b>PERSENTASE DESA BERADMINISTRASI BAIK</b>	<b>67,00</b>	<b>Point</b>	<b>73,50</b>	<b>Point</b>	<b>66,00</b>	<b>Point</b>	<b>75,10</b>	<b>Point</b>	<b>113,79</b>	<b>Point</b>	<b>66,50</b>	<b>Point</b>		<b>Point</b>		<b>Point</b>
7	01	3	0	0	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>PERSENTASE CAPAIAN PROGRAM DAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	3	2.01	0	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	3	2.01	0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang berpartisipasi dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan desa	40	Lembaga kemasyar akatan	12	Lembaga kemasyar akatan	12	Lembaga kemasyar akatan	12	Lembaga kemasyar akatan	100,00	Persen	12	Lembaga kemasyar akatan	36	Lembaga kemasyar akatan	90,00	Persen
7	01	3	2.01	0003	Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah laporan peningkatan efektivitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan	60	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	12	Laporan	14	Laporan	23,33	Persen



# PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU

# RENJA 2025

7	01	3	2.03	0	<b>Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)</b>	<b>Persentase Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Masyarakat Tingkat Kecamatan</b>	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,00	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
7	01	3	2.03	0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Masyarakat	Jumlah Lembaga masyarakat yang ditingkatkan kapasitasnya	40	Lembaga kemasyar akatan	10	Lembaga kemasyar akatan	12	Lembaga kemasyar akatan	12	Lembaga kemasyar akatan	100,00	Persen	4	Lembaga kemasyar akatan	26	Lembaga kemasyar akatan	65,00	Persen
7	01	3	2.03	0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah laporan fasilitas pengembangan usaha ekonomi masyarakat	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	1	Laporan	3	Laporan	75,00	Persen
7	01	3	2.03	0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Kegiatan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	3	Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Kegiatan		Persen	1	Kegiatan	1	Kegiatan	33,33	Persen
7	01	3	2.06	0	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	100	Persen									100	Persen	100	Persen	100	Persen
7	01	3	2.06	0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen
7	01	3	2.06	0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10	Keluarga									10	Keluarga	10	Keluarga	100,00	Persen

						INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	88,00	Point	90,87	Point	86,00	Point	91,70	Point	106,63	Point	87,00	Point		Point		Point
7	01	4	0	0		<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	4	2.01	0		<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	4	2.01	0001		Koordinasi Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	1	Laporan	3	Laporan	75,00	Persen
7	01	4	2.02	0002		Harmonisasi Hubungan Dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	1	Laporan	3	Laporan	75,00	Persen
7	01	4	2.02	0		<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	4	2.02	0001		Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	60	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	4	Laporan	100,00	Persen	4	Laporan	12	Laporan	20,00	Persen
7	01	5	0	0		<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>		<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	5	2.01	0		<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100,00</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>
7	01	5	2.01	0002		Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	210	Orang	60	Orang	60	Orang	60	Orang	100,00	Persen	50	Orang	170	Orang	80,95	Persen
7	01	5	2.01	0003		Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	400	Orang		Orang		Orang		Orang	#DIV/0!	Persen	100	Orang	100	Orang	25,00	Persen
7	01	5	2.01	0004		Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	1200	Orang	300	Orang	300	Orang	300	Orang	100,00	Persen	300	Orang	900	Orang	75,00	Persen
7	01	5	2.01	0005		Penanganan Konflik Sosial sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	4	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100,00	Persen	1	Laporan	3	Laporan	75,00	Persen
7	01	5	2.01	0008		Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	4	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	Persen	1	Dokumen	3	Dokumen	75,00	Persen



						PERSENTASE DESA BERADMINISTRASI BAIK	67,00	Point	73,50	Point	66,00	Point	75,10	Point	113,79	Point	66,50	Point		Point		Point
7	01	6	0	0	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA	PERSENTASE DESA YANG DIBINA DAN DIAWASI	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen		Persen	100	Persen	100	Persen		Persen
7	01	6	2.01	0	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Desa yang dibina</i>	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen	100,00	Persen	100	Persen	100	Persen	100	Persen
7	01	6	2.01	0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	40	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen		Persen	1	Dokumen	21	Dokumen	52,50	Persen
7	01	6	2.01	0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	60	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	12	Dokumen	100,00	Persen	12	Dokumen	36	Dokumen	60,00	Persen
7	01	6	2.01	0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	10	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100,00	Persen	0	Dokumen	2	Dokumen	20,00	Persen
7	01	6	2.01	0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	50	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	10	Dokumen	100,00	Persen	3	Dokumen	23	Dokumen	46,00	Persen

Catatan : Sub Kegiatan yang berwarna Merah adalah Sub Kegiatan Baru untuk Tahun 2025



Pasirjambu, 20 April 2025  
CAMAT PASIRJAMBU

**NIA KANIA, S.PT., M.I.L**  
N.P. 19780927 201001 2 008

## 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu

Kecamatan Pasirjambu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Pasirjambu yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pasirjambu.

Dalam menyelenggarakan tugas pokok tersebut Kecamatan Pasirjambu dituntut untuk melaksanakan fungsi yang sekaligus menjadi pelayanan perangkat daerah kewilayahan yaitu:

- a. perumusan, pengaturan, pengkoordinasikan, pembinaan dan pelaksanaan kebijakan umum dan teknis operasional bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- b. penyelenggaraan pengendalian dan fasilitasi pelaksanaan tugas bidang pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, ketentraman dan ketertiban umum, pembangunan dan sosial budaya;
- c. penyelenggaraan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. penyelenggaraan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Kecamatan.

Selain 4 (empat) fungsi tersebut, Kecamatan Pasirjambu melaksanakan pelimpahan kewenangan dari Bupati Bandung untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat pada Kecamatan Pasirjambu. Pelimpahan kewenangan tersebut ditetapkan dengan Keputusan Bupati Bandung Nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat yang telah diubah dengan Keputusan Bupati nomor 137.1/Kep.467-Tapem/2022 tentang Perubahan atas Keputusan Bupati nomor 137.1/Kep.615-KSOTDA/2019 tentang Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan dari Bupati Kepada Camat. Pelimpahan kewenangan tersebut bersifat mandat yang terdiri dari 26 (dua puluh enam) urusan dan 157 (seratus lima puluh tujuh) pelimpahan. Adapun rincian pelimpahan sebagian urusan Pemerintahan dari Bupati kepada Camat dapat dilihat sebagaimana Tabel 2.3 berikut ini :

**Tabel 2.3  
Pelimpahan Sebagian Urusan Pemerintahan  
dari Bupati Kepada Camat**

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
STATISTIK	Fasilitasi	Fasilitasi pemberian dukungan penyelenggaraan survey antar sensus kecamatan
SOSIAL	Fasilitasi	Memfasilitasi pelaksanaan pembinaan bagi anak terlantar
		Memfasilitasi pendataan dan pemantauan keberadaan anak terlantar
		Memfasilitasi penyuluhan sosial dan pencegahan anak terlantar
	Koordinasi	Koordinasi pelaksanaan kegiatan bagi wanita rawan sosial ekonomi, korban tindak kekerasan / traficking dan keluarga migran
	Rekomendasi	Memberikan rekomendasi kepada Organisasi Sosial / Panti Sosial yang berada di Desa / Kelurahan dalam hal pendaftaran baru / ulang
PERTANIAN	Fasilitasi	Fasilitasi pelaksanaan penanggulangan wabah dan penyakit hewan menular di Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi pencegahan penyakit menular di Kecamatan
	Penyelenggaraan	Identifikasi cadangan pangan dan makanan pokok masyarakat tingkat Kecamatan
PERTANAHAN	Fasilitasi	Fasilitasi penetapan tanah ulayat
		Fasilitasi penyelenggaraan pengadaan tanah untuk pembangunan bagi kepentingan umum
		Fasilitasi perencanaan penggunaan tanah wilayah kabupaten di Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi penyelesaian masalah tanah kosong
		Koordinasi aspek sosial kemasyarakatan dalam proses izin lokasi
		Koordinasi penyelesaian sengketa tanah garapan
		Koordinasi penyelesaian masalah tanah ulayat melalui musyawarah di Kecamatan
	Pengendalian	Monitoring terhadap pelaksanaan izin lokasi
PERTAMBANGAN	Fasilitasi	Fasilitasi pengembangan peran serta masyarakat dalam konservasi air bawah tanah
		Fasilitasi pengendalian pengelolaan air bawah tanah dan konservasi air bawah tanah sesuai dengan kebijakan daerah
PERPUSTAKAAN	Fasilitasi	Pembinaan teknis semua jenis perpustakaan di desa / kelurahan / pontren
PERINDUSTRIAN	Fasilitasi	Fasilitas pengembangan usaha industri kecil, tradisional dan rumah tangga
PERHUBUNGAN	Koordinasi	Perencanaan pemasangan, pemeliharaan kebersihan, serta pemantauan keamanan aset perlengkapan jalan di Desa
PERENCANAAN PEMBANGUNAN	Koordinasi	Koordinasi perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian pembangunan daerah skala Kecamatan
	Pengendalian	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kerjasama pembangunan antar Kecamatan/Desa dan antara Kecamatan/Desa dengan swasta dalam skala Kabupaten



BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Pengendalian terhadap pelaksanaan pembangunan daerah skala kecamatan dan fasilitasi pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan Desa serta Penyusunan Perubahanperumusan DSP Kecamatan
	<b>Penyelenggaraan</b>	Pelaksanaan konsultasi perencanaan dan pengendalian pembangunan daerah skala Kecamatan
		Pelaksanaan pengelolaan data dan informasi pembangunan daera skala Kecamatan
<b>PENDIDIKAN</b>	<b>Fasilitasi</b>	Memfasilitasi pelaksanaan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat
		Memfasilitasi pendataan dan pengawasan sarana dan prasarana pendidikan dasar
		Memfasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan
		Memfasilitasi perencanaan, penetapan, dan pendirian dan penutupan TK, SD, SMP serta Pendidikan Luar Sekolah (PLS)
	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi dalam penyelenggaraan pendidikan TK/SD dan SMP
	<b>Pengendalian</b>	Pengenalan dan fasilitasi satuan pendidikan anak usia dini
	<b>Rekomendasi</b>	Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD, dan SMP
<b>PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK</b>	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi dan fasilitasi kebijakan program dan kegiatan yang responsif gender
		Koordinasi pelaksanaan kebijakan perlindungan terhadap kekerasan tenaga kerja perempuan, perempuan lanjut usia dan penyandang cacat, serta perempuan di tingkat Kecamatan
		Koordinasi pelaksanaan kesejahteraan dan perlindungan anak
	<b>Penyelenggaraan</b>	Penyelenggaraan Pengarusutamaan Gender (PUG) tingkat Kecamatan
<b>PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA</b>	<b>Fasilitasi</b>	Fasilitasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (LPPDes), Laporan Kerja Pertanggungjawaban (LKPJ) Desa, Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Desa (ILLPDes)
		Fasilitasi pelaksanaan dan pelaporan penyelenggaraan tugas pembantuan ke Desa
		Fasilitasi pendataan profil Desa
		Fasilitasi pengawasan dan penanggulangan masalah-masalah penyelenggaraan pembangunan Desa
		Fasilitasi pengembangan BUMDES
		Fasilitasi penyelenggaraan pemberdayaan ekonomi penduduk miskin
		Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan produksi dan pemasaran hasil usaha masyarakat
		Fasilitasi penyelenggaraan pengembangan usaha ekonomi keluarga dan kelompok masyarakat
		Memfasilitasi pengusulan mutasi, rotasi perangkat desa di

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Kecamatan
		Memfasilitasi pengusulan penghargaan untuk perangkat desa di Kecamatan
	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi dan fasilitasi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
		Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan lembaga adat budaya
		Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG)
		Koordinasi dan fasilitasi pemberdayaan perempuan
		Koordinasi dan fasilitasi penguatan kelembagaan masyarakat desa dan kelurahan
		Koordinasi dan fasilitasi peningkatan peran masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
		Koordinasi dan fasilitasi pengolahan data profil desa dan profil kelurahan
		Mengkoordinasikan terhadap segala kegiatan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di Kecamatan dalam rangka penyelenggaraan administrasi pemerintahan, peningkatan perekonomian dan pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat dalam wilayah Kecamatan
	<b>Pembinaan</b>	Pembinaan dan supervisi pelaksanaan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK)
		Pembinaan dan supervisi pelaksanaan pemberdayaan perempuan
		Pembinaan dan supervisi pemberdayaan lembaga adat dan budaya
		Supervisi pemberdayaan masyarakat melalui pelayanan Teknologi Tepat Guna (TTG)
	<b>Pembinaan dan Pengawasan</b>	Fasilitasi administrasi tata Pemerintahan Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa
		Fasilitasi Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa
		Fasilitasi pelaksanaan tugas, fungsi dan kewajiban lembaga kemasyarakatan
		Fasilitasi penataan, pemanfaatan, dan pendayagunaan ruang Desa serta penetapan dan penegasan batas Desa
		Fasilitasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Peundang-Undangan
		Fasilitasi penetapan lokasi pembangunan kawasan perdesaan
		Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa
		Fasilitasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
		Fasilitasi Penyusunan Perubahan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa
		Fasilitasi Penyusunan Perubahan program dan pelaksanaan



BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Pemberdayaan Masyarakat Desa
		Koordinasi pendampingan Desa di wilayahnya
	<b>Penetapan</b>	Cuti Kepala Desa
		Pengangkatan dan Pemberhentian BPD
	<b>Pengawasan</b>	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pelatihan masyarakat di Kecamatan
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan lembaga adat dan budaya
		Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pemberdayaan perempuan
		Monitoring, evaluasi serta pelaporan dan pengolahan data profil desa dan kelurahan
		Monitoring, evaluasi serta pelaporan pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
	<b>Penyelenggaraan</b>	Pelaksanaan peningkatan peran serta masyarakat dalam penataan dan pendayagunaan ruang kawasan perdesaan
		Penyelenggaraan pemberhentian Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
		Penyelenggaraan pengangkatan dan pemberhentian pejabat Kepala Desa
		Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah keanggotaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
		Penyelenggaraan pengesahan, pelantikan, dan pengambilan sumpah Kepala Desa hasil pemilihan
		Penyelenggaraan penguatan kelembagaan masyarakat
	<b>Rekomendasi</b>	Koordinasi dan fasilitasi pengelolaan mitigasi pencegahan bencana
		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan administrasi pemerintahan desa dan kelurahan
		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan pemebentukan, pemekaran, penggabungan dan penghapusan desa dan kelurahan
		Koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan urusan Pemerintahan
		Koordinasi dan fasilitasi penyelesaian konflik antar Desa
		Koordinasi dan fasilitasi urusan pemerintahan di Desa
		Memberikan rekomendasi dalam pelaksanaan pencairan keuangan desa
		Memberikan rekomendasi perangkat desa
<b>PEKERJAAN UMUM</b>	<b>Fasilitasi</b>	Fasilitasi perencanaan umum pembangunan dan pemeliharaan jalan Kabupaten di wilayah Kecamatan
	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi penanganan irigasi antar Kecamatan dalam kegiatan pengairan
		Mengkoordinasikan penanganan bencana alam tingkat kecamatan

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		Mengkoordinasikan penanganan jaringan irigasi dalam wilayah Kecamatan
	<b>Rekomendasi</b>	Merekendasikan pembentukan kelembagaan P3A (Perkumpulan Petani Pemakai Air)
<b>PARIWISATA</b>	<b>Fasilitasi</b>	Fasilitasi pelaksanaan kebijakan kabupaten dalam pengembangan sumber daya pariwisata
		Fasilitasi pelaksanaan pasangiri mojang jajaka tingkat Kecamatan
		Fasilitasi pengembangan sistem informasi pemasaran pariwisata
		Fasilitasi penyelenggaraan promosi pariwisata skala Kecamatan
		Fasilitasi penyelenggaraan widya wisata skala kecamatan serta mengirim dan menerima peserta group widya wisata
		Fasilitasi sapta pesona, promosi dan sosialisasi potensi Daya Tarik Wisata (DTW)
	<b>Pembinaan</b>	Pemberdayaan masyarakat pelaku jasa usaha pariwisata
<b>LINGKUNGAN HIDUP</b>	<b>Fasilitasi</b>	Fasilitasi penerapan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
		Fasilitasi penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan
		Fasilitasi sosialisasi peraturan perundang-undangan bidang lingkungan hidup
	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi dan pelaksanaan pelestarian keanekaragaman hayati
		Koordinasi pengawasan atas pengendalian kerusakan dan/atau pencemaran lingkungan hidup yang berkaitan dengan kebakaran hutan dan/atau yang berdampak atau diperkirakan dapat berdampak skala Kecamatan
		Koordinasi pengawasan kawasan yang beresiko rawan bencana skala kecamatan
		Koordinasi pengawasan kondisi lahan dan/atau tanah skala kecamatan
		Memantau dan membina masyarakat dalam pengelolaan sampah di TPST
		Mengarahkan masyarakat dalam hal pengangkutan sampah dari sumber Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
		Mengkoordinasikan pengelolaan sampah di masyarakat tingkat kecamatan
		Pengadaan lahan dan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST)
		Pengadaan roda sampah dan tempat sampah terpilah
		Penyebaran informasi tentang sampah kepada masyarakat
	<b>Pengumpulan Data dan Informasi</b>	Melaksanakan Inventarisasi kegiatan/usaha yang berpotensi menimbulkan pencemaran lingkungan skala Kecamatan
<b>KOPERASI DAN USAHA KECIL MENENGGAN</b>	<b>Penyelenggaraan</b>	Penyelenggaraan pencatatan dan pendataan koperasi UMKM di Kecamatan
<b>KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA</b>	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi dan fasilitasi kegiatan forum komunikasi dan informasi dalam rangka pemberdayaan kelompok

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		komunikasi sosial
		Koordinasi dan fasilitasi sinergitas kelompok / organisasi yang bergerak di bidang informasi sebagai upaya penyalarsan media dengan program pembangunan di Kecamatan
KETAHANAN PANGAN	Fasilitasi	Fasilitasi pencegahan dan pengendalian masalah pangan sebagai akibat menurunnya ketersediaan pangan tingkat Kecamatan
	Koordinasi	Koordinasi mengidentifikasi kelompok rawan pangan
		Koordinasi pencegahan dan penanggulangan masalah pangan sebagai akibat menurunnya mutu, gizi dan keamanan makanan
KESEHATAN		Koordinasi pemantauan terhadap cadangan pangan, distribusi pangan dan kerawanan pangan masyarakat
	Koordinasi	Mengkoordinasikan operasional penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah
		Mengkoordinasikan pencegahan gizi buruk
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI		Mengkoordinasikan upaya penurunan jumlah kematian Ibu, jumlah kematian bayi dan jumlah kematian balita
	Koordinasi	Pengendalian Penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat di bidang fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada
	Pembinaan	Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (Bimbingan, pemantauan, dan evaluasi) di Bidang ketahanan Ideologi Negara, Bela Negara, dan memfasilitasi usulan penghargaan kebangsaan
		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (Koordinasi, bimbingan, konsultasi) di bidang bina masyarakat, tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial
		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat (koordinasi, konsultasi, pemantauan) dan fasilitasi pemilu, pilpres dan pilkada
		Pembinaan dan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
		Pengendalian penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat berupa koordinasi di bidang ketahanan seni dan budaya, agama dan kepercayaan, pembauran dan akulturasi budaya dan penanganan masalah sosial kemasyarakatan
	Pengawasan	Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara, nilai-nilai sejarah dan kebangsaan serta usulan penghargaan.
	Pengendalian	Pengendalian penyelenggaraan pemerintah di Kecamatan, Kelurahan, Desa dan Masyarakat di bidang bina

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
		masyarakat, tenaga kerja, dan penanganan konflik sosial
	<b>Penyelenggaraan</b>	Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, bela negara dan usulan penghargaan kebangsaan
		Pelaksanaan kegiatan di bidang ketahanan ideologi negara, wawasan kebangsaan, bela negara, nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan
<b>KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL</b>	<b>Fasilitasi</b>	Fasilitasi pencatatan sipil skala Kecamatan
	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi penyelenggaraan pendaftaran penduduk skala Kecamatan
		Pengendalian penyelenggaraan pencatatan sipil lingkup Kecamatan
	<b>Pengumpulan Data dan Informasi</b>	Pengumpulan data kelahiran kematian tingkat Kecamatan
	<b>Penyelenggaraan</b>	Penyelenggaraan pelaporan pendaftaran penduduk
		Penyelenggaraan sosialisasi bimbingan teknis supervisi dan konsultasi pelaksanaan pendaftaran penduduk
	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi pelayanan pencatatan sipil lingkup Kecamatan
<b>KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA</b>	<b>Fasilitasi</b>	Fasilitasi aktivitas kepemudaan di Kecamatan
		Fasilitasi Pembangunan pusat pemberdayaan pemuda di Kecamatan
	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi bidang kepemudaan di Kecamatan
	<b>Pembinaan</b>	Pembinaan dan koordinasi secara hirarkis pemerintahan di bidang kepemudaan
		Pembinaan di bidang kepemudaan dan keolahragaan di Kecamatan
<b>KELUARGA BERENCANA DAN KELUARGA SEJAHTERA</b>	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi pelaksanaan jaminan dan pelayanan Keluarga Berencana, peningkatan partisipasi pria, penanggulangan masalah kesehatan reproduksi serta kelangsungan hidup ibu, bayi dan anak berupa
		Koordinasi pelaksanaan promosi pemenuhan hak-hak reproduksi dan promosi kesehatan reproduksi
		Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender terutama partisipasi Keluarga Berencana (KB) pria dalam pelaksanaan program pelayanan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
		Penyelenggaraan dan fasilitasi upaya peningkatan kesadaran keluarga berkehidupan seksual yang aman dan terbebas dari HIV/AIDS dan Infeksi menular Seksual (IMS)
		Penyelenggaraan dukungan pelayanan rujukan Keluarga Berencana (KB) dan kesehatan reproduksi
		Perluasan jaringan dan pembinaan pelayanan Keluarga Berencana (KB) di Kecamatan
<b>KEHUTANAN</b>	<b>Koordinasi</b>	Koordinasi inventarisasi hutan produksi dan hutan lindung dan skala Daerah Aliran Sungai (DAS) dalam wilayah Kecamatan
		Koordinasi pelaksanaan perlindungan hutan pada hutan produksi. Hutan lindung yang tidak dibebani hak dan hutan adat serta hutan taman raya

BIDANG	JENIS KEWENANGAN	RINCIAN PELIMPAHAN
	Rekomendasi	Rekomendasi untuk izin pengelolaan sarang burung walet, lebah madu, dan budidaya jamur
KEBUDAYAAN	Penyelenggaraan	Pembinaan lembaga kepercayaan terhadap Tuhan YME dan lembaga adat
		Penanaman nilai-nilai tradisi serta pembinaan watak dan budi pekerti bangsa
		Penyelenggaraan perlindungan, pengembangan dan pemanfaatan kebudayaan skala Kecamatan meliputi
	Rekomendasi	Rekomendasi pemberian penghargaan kepada seniman, budayawan yang telah berjasa kepada negara dan daerah
KEARSIPAN	Penyelenggaraan	Melaksanakan pelaporan arsip dinamis aktif dan inaktif setiap triwulan ke Kabupaten

Keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi tersebut diukur dari pencapaian sasaran strategis dengan 4 (empat) Indikator Kinerja Utama (IKU). IKU ditetapkan sebagai ukuran keberhasilan dalam penyelenggaraan manajemen kinerja pemerintahan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja. Penetapan IKU secara teknis dirumuskan untuk acuan ukuran kinerja yang digunakan untuk menyusun target kinerja dalam Renja tahunan. Sasaran strategis dan indikator kinerja untuk tahun 2021 - 2026 digambarkan pada gambar berikut ini

**Gambar 2.1**

**Indikator Kinerja Utama Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026**



Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program dan sasaran yang telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung. Selanjutnya sebagai perwujudan transparansi kinerja Kecamatan Pasirjambu telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja yang diperjanjikan antara Camat Pasirjambu dengan Bupati Bandung.

Adapun Tingkat Capaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu yang berdasarkan pada Indikator Target Renstra Tahun 2021-2026 dan Realisasi Capaian tahun kebelakang termasuk proyeksi tahun berjalan, disajikan pada Tabel TC.30 berikut ini :

**Tabel 2.4 - TC. 30  
Pencapaian Kinerja Pelayanan Kecamatan Pasirjambu  
Kabupaten Bandung**

NO	Indikator	SPM / Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian		Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun				Tahun		Tahun		
				2022	2023	2024	2025	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	11	11	13	13	14
1	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan (AKIP)		73,80	67,77	68,45	69,00	69,50	73,80	80,40	82,60 (Nilai Prediksi)	85,10 (Nilai Prediksi)	Realisasi capaian didasarkan pada LHE Inspektorat, No. Realisasi pencapaian ini merupakan hasil dari kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan akuntabilitas kinerja baik pada bidang sektoral maupun pada bidang kesekretariatan, itupun masih terdapat kekurangan dan kelemahan yang harus segera diselesaikan.  Secara garis besar, kekurangan yang harus diselesaikan / ditindaklanjuti diantaranya pada aspek penyalarsan antara perencanaan kinerja dengan pelaksanaan kinerja yang diiringi evaluasi internal sehingga dapat memberikan alternatif perbaikan pada pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.

2	Prosentase BMD/ Aset Dalam Kondisi Baik		93,15	98,50	98,50	98,50	98,50	93,15	99,96	99,98 (Nilai Prediksi)	100,00 (Nilai Prediksi)	<p>Pengelolaan BMD di Kecamatan Pasirjambu masih terdapat dan ditemukan permasalahan, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kurang lengkapnya data jumlah, nilai, kondisi, dan status kepemilikan BMD. Permasalahan ini terkait dengan identifikasi dan inventarisasi.</li> <li>2. Belum tersedianya basis data internal terintegrasi yang akurasi dan validitasnya dapat dipertanggungjawabkan untuk keperluan Penyusunan Perubahanneraca Pemerintah Daerah.</li> <li>3. Terdapatnya perbedaan persepsi diantara pemangku kepentingan dalam hal pengelolaan BMD.</li> </ol> <p>Selain permasalahan-permasalahan tersebut diatas, penurunan tersebut juga disebabkan belum dilakukannya penghapusan barang yang telah habis masa pakai. Dan barang-barang yang nilainya kurang dari Rp. 500.000,00 belum dilakukan reklasifikasi.</p> <p>Sebagai upaya penyelesaian masalah-masalah diatas, pada tahun 2023 Pemerintah Kecamatan Pasirjambu merencanakan langkah strategis dalam rangka peningkatan Persentase BMD Dalam Kondisi Baik, yaitu :</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembuatan bank data informasi barang yang dapat diakses baik secara online maupun offline untuk kemudahan aksesibilitas terhadap data BMD.</li> <li>2. Pembentukan tim khusus untuk penyelesaian tertib administrasi dan penggunaan BMD dan penyelesaian reklasifikasi barang.</li> <li>3. Pembenahan sarana gudang tempat menampung asset.</li> </ol>	
3	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)		90,87	84,00	85,00	86,00	87,00	90,87		91,70 (Nilai Prediksi)	93,40 (Nilai Prediksi)	95,80 (Nilai Prediksi)	<p>Pencapaian ini masih dalam proses penilaian dan merupakan hasil dari perencanaan efektivitas serapan anggaran dan kekompakan dalam pelaksanaan pekerjaan baik pada level Struktural maupun pada level Pelaksana dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh bidang yang menjadi kewenangan Kecamatan Pasirjambu. Selain itu, pencapaian ini adalah hasil dari kesiapan seluruh elemen dalam menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat.</p>
4	Persentase Desa Beradministrasi Baik		73,50	65,00	65,50	66,00	66,50	73,50		75,10 (Nilai Prediksi)	75,60 (Nilai Prediksi)	80,20 (Nilai Prediksi)	<p>Catatan masih dalam tahap monitoring dan evaluasi Tim yang berkaitan dengan pengelolaan administrasi Desa belum sepenuhnya dijadikan bahan perbaikan dan perumusan kebijakan kedepan oleh Desa</p>

### 2.3. Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Kecamatan Pasirjambu

Kecamatan Pasirjambu berdasarkan tugas pokok dan fungsinya dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan. Adapun rincian tugas pokok Kecamatan Pasirjambu yaitu memimpin, merumuskan, mengkoordinasikan, melaksanakan dan mengendalikan tugas umum pemerintahan serta urusan

pemerintahan yang dilimpahkan oleh Bupati untuk menangani sebagian urusan pemerintahan di wilayah Kecamatan Pasirjambu.

Dalam menyelenggarakan tugas tersebut Kecamatan Pasirjambu dituntut untuk melaksanakan perencanaan kinerja yang efektif serta memastikan pencapaian tujuan, sasaran Kecamatan Pasirjambu melalui proses perencanaan serta monitoring dan evaluasi. Pada tabel T-C.30 telah dijelaskan pencapaian kinerja pelayanan Perangkat Daerah namun perlu digaris bawahi bahwa masih terdapat hal-hal kritis yang berkaitan dengan pencapaian kinerja berdasarkan indikator sasaran yang ditargetkan, yaitu sebagai berikut :

### **(1). Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN dan bebas dari pungli, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang SAKIP, Peraturan Pererintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemenintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilirtas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Aun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Keputusan Bupati Bandung Nomor 700 / KEP 168 – INSPEKTORAT / 2024 tanggal 30 Mei 2024 tentang pembentukan Tim Evaluasi Sistem Akuntabilirtas Kinerja instansi Pemerintah (SAKIP) dilingkungan Pererintah Kabupaten Bandung Tahun 2024 dan Surat Perintat Inspektur Daerah Kabupaten Bandung Nomor 500.2.4.3/1303/Irban I tanggal 6 Juni 2024, kami telah melakukan evaluasi terhadap Akuntabiltas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2024.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah maka perlu dilakukan suatu evaluasi atas implementasi SAKIP di Perangkat Daerahnya. Dalam rangka pelaksanaan SAKIP, Pemerintah Kabupaten Bandung telah melaksanakan evaluasi SAKIP yang dilakukan oleh Inspektorat Kab. Bandung.

Pada setiap penugasan evaluasi AKIP atas implementasi SAKIP perlu dirancang desain evaluasi tersendiri berupa petunjuk teknis pelaksanaan evaluasi untuk memenuhi tujuan evaluasi AKIP yang ditetapkan sesuai dengan kondisi pada saat pelaksanaan evaluasi.

Pada Tahun 2024 Inspektorat telah melakukan evaluasi atas AKIP Pemerintah Kecamatan Pasirjambu dengan tujuan :

- Secara umum tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauh mana implementasi SAKIP dilaksanakan, serta untuk mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil, sehingga diharapkan dapat mendorong setiap instansi pemerintah, baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah untuk berkomitmen dan secara konsisten mewujudkan capaian kinerja (hasil) yang telah direncanakan melalui implementasi SAKIP. Tujuan evaluasi AKIP secara khusus dapat ditentukan setiap tahun sesuai dengan kebijakan atas implementasi SAKIP yang ditetapkan. Tujuan dan Sasaran evaluasi sangat bergantung pada para pihak pengguna hasil evaluasi dan kebijakan pimpinan instansi/unit kerja yang diberi wewenang untuk melakukan evaluasi, dengan mempertimbangkan berbagai kendala yang ada.
- Tujuan khusus dilakukannya evaluasi AKIP setiap tahunnya adalah minimal untuk :
  1. Memperoleh informasi tentang implementasi SAKIP;
  2. Menilai tingkat implementasi SAKIP
  3. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja,
  4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi SAKIP; dan
  5. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) tersebut menghasilkan output nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP). Berikut ini adalah tabel kategori penilaian AKIP dimaksud :

**Tabel 2.5**  
**Kriteria Penilaian Capaian Nilai Akuntabilitas**  
**Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)**

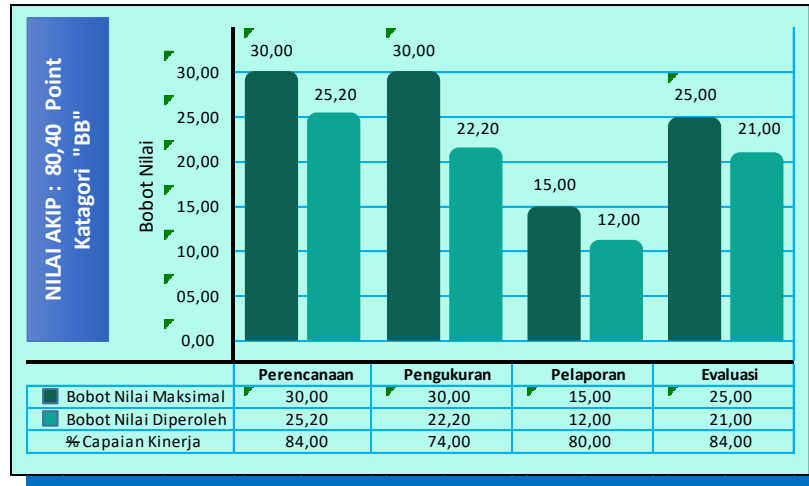
NO	KATAGORI	INTERVAL NILAI	INTERPRETASI
1.	AA	91 – 100	<b>Sangat Memuaskan</b>
2.	A	81 – 90	<b>Memuaskan</b> , memimpin perubahan, berkinerja tinggi, dan sangat akuntabel
3.	BB	71 – 80	<b>Sangat Baik</b> , akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal.
4.	B	61 – 70	<b>Baik</b> , akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan
5.	CC	51 – 60	<b>Cukup</b> , memadai. Akuntabilitas kinerjanya cukup baik, taan kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu banyak perbaikan tidak mendasar.
6.	C	31 – 50	<b>Kurang</b> , sistem dan tatanan kurang dapat diandalkan, memiliki sistem untuk manajemen kinerja tapi perlu banyak perbaikan minor dan perbaikan yang mendasar.
7.	D	0 – 30	<b>Sangat Kurang</b> , sistem dan tatanan tidak dapat diandalkan untuk penerapan manajemen kinerja. Perlu banyak perbaikan, sebagian perubahan yang sangat mendasar.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 4 komponen besar manajemen kinerja yang meliputi :

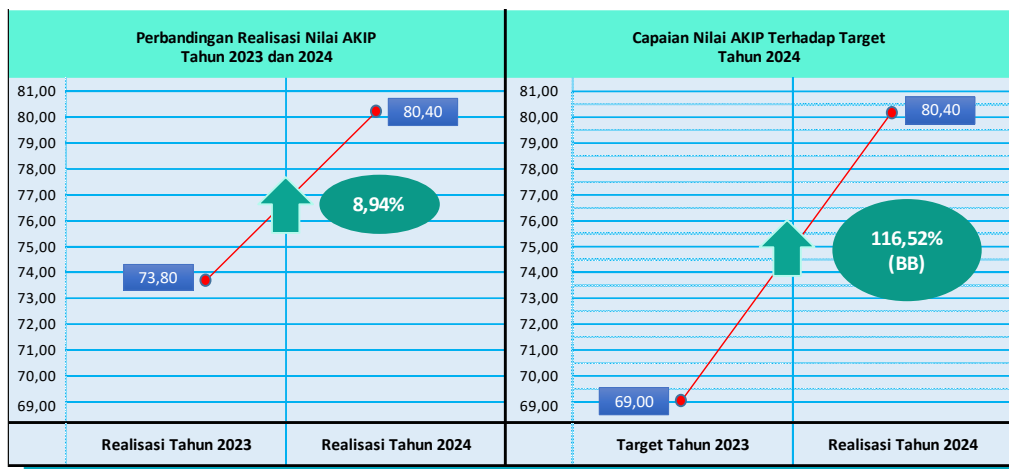
1. Evaluasi atas Perencanaan Kinerja,
2. Evaluasi atas Pengukuran Kinerja,
3. Evaluasi atas Pelaporan Kinerja,
4. Evaluasi atas Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE AKIP) pada Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2024 Nomor : 700/291/Inspektorat, Tanggal 27 Juni 2024, Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung memperoleh Nilai Akuntabilitas Kinerja sebesar **80,40** dengan kategori “**A**” Interpretasi (**Memuaskan**). Dengan nilai tersebut dapat diinterpretasikan bahwa Akuntabilitas Kinerja Kecamatan Pasirjambu sudah sangat baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja namun perlu adanya perbaikan. Untuk itu kami sajikan grafik rincian pencapaian Nilai AKIP Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 sebagaimana tercantum pada gambar 2.2 sebagai berikut :

**Gambar 2.2**  
**Grafik Penilaian AKIP Kecamatan Pasirjambu**  
**Tahun 2024**



**Gambar 2.3**  
**Perbandingan Realisasi Nilai AKIP Tahun 2023 - 2024 dan**  
**Capaian Nilai AKIP Terhadap Target Tahun 2024**



Dari Gambar 2.3 terlihat bahwa perbandingan capaian Nilai AKIP Kecamatan Pasirjambu antara Tahun 2023 dan 2024 tumbuh sebesar 8,94%.

Dan capaian Nilai AKIP Tahun 2024 tercapai senilai **80,40 Point** dari target yang ditentukan senilai **69,00 Point** atau dengan persentase sebesar **116,52%**. Kenaikan yang sangat signifikan ini tidak terlepas dari kerjasama dan sinergitas antara pimpinan dan bawahan dalam mengimplementasikan Akuntabilitas Kinerja baik pada bidang sektoral maupun pada bidang kesekretariatan. Namun, berdasarkan hasil evaluasi Inspektorat terhadap implementasi SAKIP Kecamatan Pasirjambu, pencapaian tersebut masih terdapat kekurangan-kekurangan dalam berbagai aspek yang harus diperbaiki, berikut ini kami sajikan Laporan Hasil Evaluasi Sasaran Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LHE SAKIP) pada Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2024, yaitu :

A. Kondisi berupa gambaran baik maupun catatan kekurangan tentang kondisi sebelum, sesudah, serta dampak keberhasilan pada :

1) **Evaluasi atas Perencanaan Kinerja**

Perencanaan Kinerja memperoleh nilai **25,20 ( 84% )**, dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan dokumen perencanaan kinerja memperoleh nilai **6,00 ( 100%)** dengan kriteria : Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka panjang, Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka menengah, terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka pendek, terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja dan Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.

b. Kualitas

Dokumen Perencanaan Kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penyelarasan (cascading) di setiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting) memperoleh nilai **7,20 ( 80% )** dengan kriteria sebagai berikut: Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan, Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu, Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan dasar Kinerja sebenarnya yang perlu dicapai, Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai, Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART, Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis). Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis, Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading), Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting), Setiap unit/satuan kerja (bidang/bagian di OPD) merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja dan Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.

c. Pemanfaatan

Perencanaan kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan memperoleh nilai **12,00** ( 80% ) dengan kriteria sebagai berikut: Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai; Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai; Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih *on the right track*; Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selaludipantau secara berkala; Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya; Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam mewujudkan kondisi/hasil yang lebih baik; Setiap unit/satuan kerja (bidang/bagian di OPD) memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dan Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja.

**Namun masih terdapat kekurangan** : *target yang ditetapkan dalam perencanaan Kinerja belum sepenuhnya tercapai.*

**2) Evaluasi atas Pengukuran Kinerja**

Pengukuran Kinerja memperoleh nilai **22,20** ( 74% ) dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan dokumen pengukuran kinerja memperoleh nilai **6,00** (100%) dengan kriteria: Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja; Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja dan Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.

b. Kualitas

Pengukuran Kinerja telah menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan telah dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan memperoleh nilai **7.20** (80%) dengan kriteria sebagai berikut : Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (*decision maker*) dalam mengukur capaian kinerja; Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan. Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan; Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala; Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian kinerja unit

dibawahnya secara berjenjang, Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi) dan Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).

**Namun masih terdapat kekurangan :**

1. *Penggunaan aplikasi SIAKANG dalam pengumpulan data kinerja belum ditetapkan berupa Keputusan Bupati;*
2. *Penggunaan aplikasi SIDALMONEV dalam pengukuran kinerja belum ditetapkan berupa Keputusan Bupati.*

c. Pemanfaatan

Pengukuran Kinerja telah dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien memperoleh nilai **9,00** ( 60% ) dengan kriteria sebagai berikut : Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja / penghasilan; Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan / penghapusan Jabatan baik struktural maupun fungsional; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian ( *refocusing* ) organisasi; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian kebijakan dalam mencapai kinerja; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja; Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian anggaran dalam mencapai kinerja; Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja; Setiap unit satuan kerja ( bidang / bagiandi OPD ) memahami dan peduli alas hasil pengukuran kinerja dan Setiap pegawai memahami dan peduli alas hasil pengukuran kinerja,

**3) Evaluasi atas Pelaporan Kinerja**

Pelaporan Kinerja nilai **12,00** ( 80% ), dengan kriteria sebagai berikut :

a. Keberadaan

Keberadaan dokumen pelaporan kinerja memperoleh nilai **2,40** ( 80% ) dengan kriteria : Dokumen Laporan Kinerja telah disusun, Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala, Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan, Dokumen Laporan Kinerja telah direviu, Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan dan Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.

Namun masih terdapat kekurangan : *penyampaian Laporan Kinerja (LKIP) kepada Bupati Bandung tidak di/aksanakan sehingga tidak adanya surat pengantar penyampaian LKIP Tahun 2023.*

b. Kualitas

Dokumen Laporan Kinerja telah memenuhi Standar menggambarkan Kualitas atas Pencapaian Kinerja, informasi keberhasilan/kegagalan kinerja serta upaya perbaikan/penyempurnaannya memperoleh nilai **3,60** ( 80% ) dengan kriteria sebagai berikut :

Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar; Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkapkan seluruh informasi tentang pencapaian kinerja; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja); Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya; Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi alas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja dan Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempumaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja), **namun masih terdapat catatan kekurangan** : *Dokumen Laporan Kinerja be/um menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark) dikarenakan tidak adanya template dari Bagian Organisasi Setda Kab Bandung tentang benchmark.*

c. Pemanfaatan

Pelaporan Kinerja telah memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya memperoleh nilai **6,00** ( 80%) dengan kriteria sebagai berikut: Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab); Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai; Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja; Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja; Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian

keberhasilan kinerja; Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.

#### **4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal memperoleh nilai **21,00** ( 84% ) dengan kriteria sebagai berikut :

d. Keberadaan

Keberadaan dokumen Evaluasi Akuntabilitas kinerja internal memperoleh nilai **5,00** ( 100% ) dengan kriteria : Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja / perangkat daerah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.

e. Kualitas

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai memperoleh nilai **6,00** ( 80% ) dengan kriteria sebagai berikut :

Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SOM yang memadai; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai; Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan pada seluruh unit kerja/perangkat daerah dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi),

**namun masih terdapat catatan kekurangan :**

1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum agar dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

f. Pemanfaatan

Implementasi SAKIP telah meningkat karena evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal sehingga memberikan kesan yang nyata (dampak) dalam efektifitas dan efisiensi Kinerja memperoleh nilai **10,00** ( 80%) dengan kriteria sebagai berikut :

Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti; Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja internal; Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja; Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja dan Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.

#### **5) Nilai Akuntabilitas Kinerja**

Hasil evaluasi **secara keseluruhan** yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 s.d. 100 Kantor Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung memperoleh nilai sebesar **80,40** ( 3,22 % ) dengan kategori **A** Interpretasi (**Memuaskan**). Nilai tersebut diperoleh dari penjabaran hasil analisis komponen penilaian yang terdiri dari Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.

#### **B. Rekomendasi atas catatan kekurangan untuk perbaikan**

Terhadap permasalahan yang ditemukan dalam proses evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Kantor Kecamatan Rancabali Kab.Bandung, kami rekomendasikan sebagai berikut :

##### **1. Perencanaan Kinerja**

Pemanfaatan :

Target Kinerja yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja agar dapat dicapai sesuai dengan yang telah ditetapkan

##### **2. Pengukuran Kinerja**

Kualitas :

- a. Penggunaan aplikasi SIAKANG dalam pengumpulan data kinerja agar ditetapkan berupa Keputusan Bupati;
- b. Penggunaan aplikasi SIDALMONEV dalam pengukuran kinerja agar ditetapkan berupa Keputusan Bupati.

##### **3. Pelaporan Kinerja**

Keberadaan :

Penyampaian Laporan Kinerja (LKIP) kepada Bupati Bandung agar dilaksanakan secara tepat waktu maksimal 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran dengan disertai surat pengantar yang ditujukan kepada Bupati.

Kualitas :

Dokumen Laporan Kinerja agar menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional (benchmark).

**4. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal**

Kualitas :

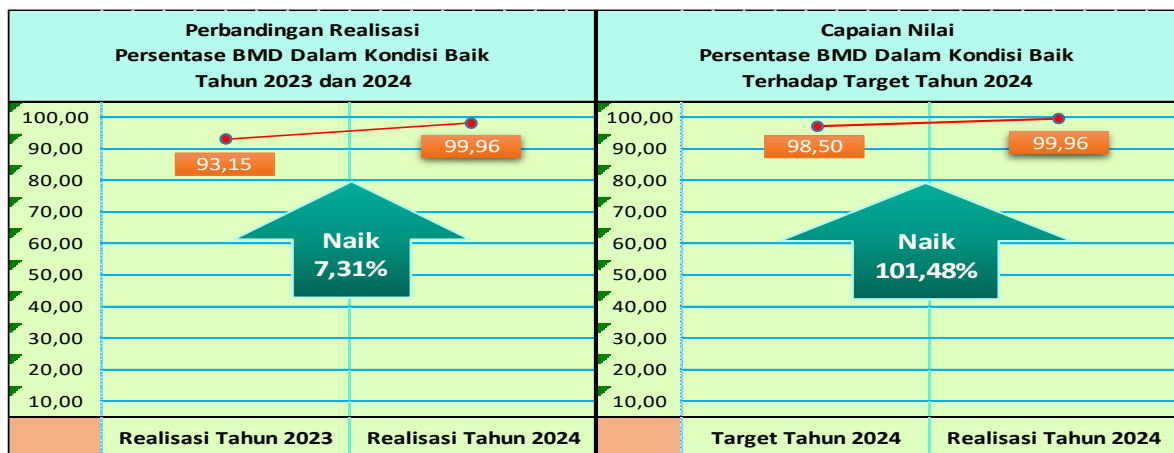
1. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai;
2. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum agar dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).

**(2). Persentase Barang Milik Daerah (BMD) dalam Kondisi Baik**

Barang dalam hal ini adalah benda dalam berbagai bentuk dan uraian yaitu meliputi bahan baku, barang setengah jadi, barang jadi / peralatan yang spesifikasinya ditetapkan oleh pengguna barang / jasa. Dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah, Barang Milik Daerah (BMD) menjadi salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga harus dikelola dengan baik : akuntabel, efektif, efisien, dan ekonomis.

Berikut ini adalah capaian persentase BMD Dalam Kondisi Baik yang akan digambarkan pada gambar berikut ini :

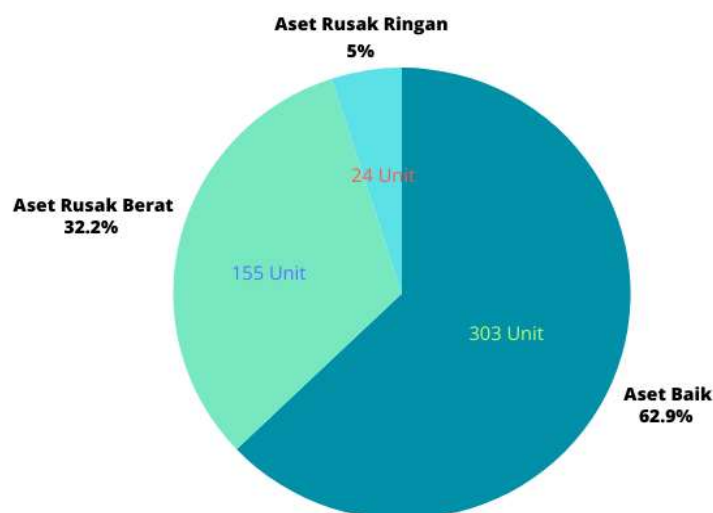
**Gambar 2.4**  
**Perbandingan Realisasi BMD Dalam Kondisi Baik Tahun 2023 - 2024 dan**  
**Capaian Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Terhadap Target Tahun 2024**



Indikator Persentase BMD Dalam Kondisi Baik Kecamatan Pasirjambu pada Tahun 2024 memiliki target yaitu 98,50%, berhasil terealisasi dengan hasil

capaian 99,96%. Meskipun telah tercapai target akan tetapi masih ada aset yang tercatat rusak berat sebanyak 155 unit atau sebanyak 32,2% belum dapat dihapuskan mengingat saat ini Kecamatan Pasirjambu sedang melaksanakan tahap penertiban aset milik daerah baik penertiban dari sisi administrasi maupun dari fisik aset-aset itu sendiri. Selain itu, terdapat aset rusak ringan sebanyak 24 unit atau 5% termasuk 2,5% aset yang masih dipakai, dari total keseluruhan aset yang masih diperlukan dalam kegiatan pekerjaan, mengingat anggaran untuk mengganti atau memperbaiki aset rusak ringan yang masih dipakai tersebut sangat terbatas sehingga barang-barang tersebut belum dapat dihapuskan. Berikut ini grafik kondisi barang milik daerah Kecamatan Pasirjambu Tahun 2023-2024.

**Gambar 2.5**  
**Grafik Kondisi Barang Milik Daerah Tahun 2023-2024**



Meski target Persentase BMD Dalam Kondisi Baik telah tercapai, Kecamatan Pasirjambu tetap berkomitmen memegang prinsip akuntabilitas dalam seluruh pelaporan sebagai wujud implementasi transparansi informasi sebagai sarana evaluasi untuk perbaikan kedepannya. Sebagai upaya penyelesaian permasalahan, pada Tahun 2024 Pemerintah Kecamatan Pasirjambu merencanakan langkah-langkah strategis dalam rangka peningkatan Persentase BMD Dalam Kondisi Baik. Adapun langkah-langkah tersebut yaitu :

1. Menyelesaikan penertiban Aset / BMD agar prosedur penghapusan barang dengan kondisi rusak secara bertahap dapat ditempuh. Rencananya, proses ini akan selesai tahun 2025 yang diakhiri dengan sensus BMD secara keseluruhan.
2. Melaksanakan sensus BMD secara keseluruhan dengan memanfaatkan teknologi informasi sebagai sarana pendataan aset sehingga pembenahan

aset dapat terlaksana. Dan juga output dari sensus BMD tersebut digunakan sebagai acuan dasar untuk proses rekonsiliasi aset daerah.

3. Pembentukan tim khusus untuk penyelesaian tertib administrasi dan penggunaan BMD dan penyelesaian reklasifikasi barang.

### **(3). Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)**

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. Penilaian yang diberikan langsung oleh masyarakat diharapkan dapat menentukan ukuran kinerja pelayanan publik. Kegiatan yang dapat dilakukan untuk mengetahui pelayanan publik adalah dengan mengukur tingkat kepuasan masyarakat. Salah satu metode yang digunakan untuk mengetahui kualitas pelayanan suatu organisasi publik adalah dengan menggunakan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Ketentuan mengenai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 110 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pelayanan Publik di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung melalui Survei Kepuasan Masyarakat (SKM).

Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) sendiri adalah pengukuran secara komperhensif tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik. Di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung implementasi SKM dilakukan melalui sarana teknologi yang dapat mengakomodir pengisian survei secara *online*, yaitu aplikasi e-SKM. Jenis pelayanan dalam pelaksanaan SKM melalui e-SKM di Kecamatan Pasirjambu pada Tahun 2024 dilaksanakan dari tanggal 26 Pebruari 2024 s/d 14 Juni 2024 total pelayanan sebanyak 21 jenis pelayanan yang terakomodir baru 11 jenis pelayanan, dengan rincian jenis pelayanan sebagai berikut :

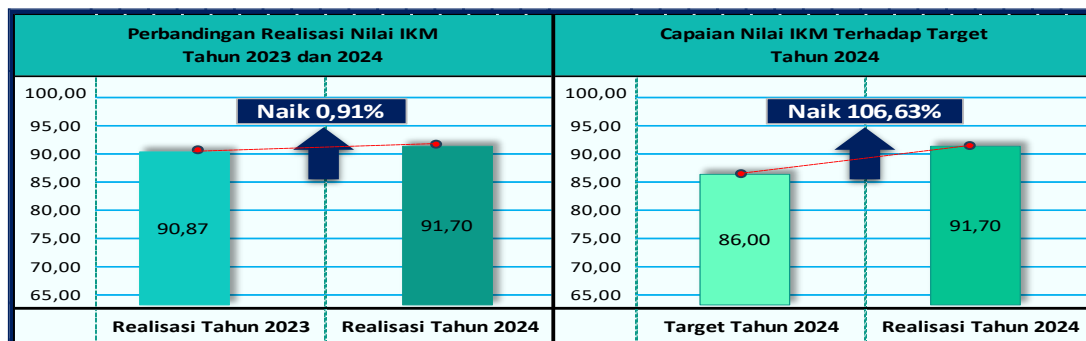
- Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga
- Fasilitasi Pembuatan KTP
- Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran
- Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas Anak
- Rekomendasi dalam Pelaksanaan Pencairan Keuangan Desa
- Pembuatan Akta Pertanahan
- Fasilitasi Surat Keterangan Ahli Waris
  
- Fasilitasi Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu
- Legalisir Dokumen

- Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
- Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya Tingkat Kecamatan.

Nilai IKM sementara didalam Aplikasi <https://skm.bandungkab.go.id/home> s/d pertanggal 14 Juni 2024 baru sebesar 88,74% dari 11 jenis pelayanan.

Adapun apabila hasil Survei dilakukan s/d bulan Desember Tahun 2024 diperkirakan akan mencapai Nilai sebagaimana tercantum pada gambar berikut ini :

**Gambar 2.6**  
**Capaian Nilai IKM dan Perbandingan Capaian Nilai IKM**



*Catatan Nilai ini belum final dikarenakan penilaian IKM masih berjalan*

**Gambar 2.7**  
**Informasi Detail Responden Dalam Penilaian IKM Tahun 2023 dan IKM Tahun 2024 Kecamatan Pasirjambu**

Nilai IKM Tahun 2023  
Total Responden 2.749

Nilai IKM s/d 14 Juni Tahun 2024  
Total Responden 738



Pada Gambar 2.6 dan 2.7 terlihat ada Perbedaan Nilai IKM, itu semua disebabkan karena Nilai IKM pada Gambar 2.6 adalah Nilai Perkiraan yang akan dicapai s/d bulan Desember Tahun 2024 sedangkan pada Gambar 2.7 adalah Nilai IKM Pertanggal 14 Juni Tahun 2024 yang diambil dari Aplikasi <https://skm.bandungkab.go.id/laporan/survey/DashboardIKM/null/null/NilaiIKM>, apabila Nilai IKM perkiraan sesuai maka perbandingan realisasi Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) pada Tahun 2024 mengalami kenaikan sebesar 0,91% dari Tahun 2023 dan Capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Tahun 2024 juga mengalami kenaikan sebesar 106,63% dari Target yang telah ditetapkan sebesar 86,00 Point.

Kenaikan realisasi dan capaian Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) tersebut diraih berdasarkan beberapa faktor diantaranya kedisiplinan dan keseriusan memperbaiki kekurangan pelayanan di tahun yang lalu terutama selalu memberikan pelayanan yang ramah dan memberikan penjelasan secara rutin dan rinci kepada warga masyarakat yang akan membuat surat-surat keterangan tentang adanya beberapa mekanisme dalam hal proses pembuatan / penerbitan surat-surat keterangan yang dibutuhkan, terlihat pada Tabel 2.6 dibawah di Tahun 2023 terakomodir 25 Jenis Pelayanan dan pada Tahun 2024 baru 11 Jenis Pelayanan yang terakomodir, jadi ada 14 Jenis pelayanan yang Respondennya belum membuat layanan tersebut dalam e-SKM di Tahun 2024 akan tetapi mengingat masih panjangnya waktu dan masih berjalannya survey diharapkan dapat menambah capaian realisasi melebihi target yang direncanakan.

Berikut inikami sajikan beberapa perbedaan jenis layanan di e-SKM antara Tahun 2023 dan Tahun 2024 (Pertanggal 14 Juni 2024), sebagaimana terlihat pada Tabel berikut ini :

**Tabel 2.6**  
**Jenis Unsur Pelayanan yang Diakomodir pada e-SKM**  
**Tahun 2023 dan Tahun 2024**

No	Perbedaan Jenis Unsur Pelayanan e-SKM	
	Tahun 2023	Tahun 2024
1	Rekomendasi Usul Rencana Pendirian Sekolah TK, SD, dan SMP	Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga
2	Pencatatan dan Pendataan Koperasi dan UMKM	Fasilitasi Pembuatan KTP
3	Fasilitasi Pembuatan Kartu Keluarga (KK)	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran
4	Fasilitasi Pembuatan KTP	Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas Anak
5	Fasilitasi Pembuatan Akta Kelahiran	Rekomendasi dalam Pelaksanaan Pencairan Keuangan Desa
6	Fasilitasi Pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA)	Pembuatan Akta Pertanahan
7	Rekomendasi dalam Pelaksanaan Pencairan Keuangan Desa	Fasilitasi Surat Keterangan Ahli Waris
8	Fasilitasi Pembuatan Surat Pindah	Fasilitasi Rekomendasi Surat Keterangan Tidak Mampu
9	Pembuatan Akta Pertanahan	Legalisir Dokumen
10	Fasilitasi Surat Keterangan Tidak Mampu (SKTM)	Fasilitasi Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
11	Fasilitasi Pembuatan Akta Kematian	Penyelenggaraan Pagelaran Seni dan Budaya Tingkat Kecamatan.
12	Legalisir Dokumen	
13	Rekomendasi Kartu Kerja	
14	Rekomendasi Bantuan Dana/Hibah	
15	Rekomendasi untuk Izin Pengelolaan Sarang Burung Walet, Lebah Madu, dan Budi Daya Jamur	

16	Pembuatan Surat Keterangan Lainnya	
17	Rekomendasi Pemberian Penghargaan kepada Seniman, Budayawan yang telah berjasa kepada Negara dan Daerah	
18	Fasilitasi Penyelesaian Masalah Pertanahan	
19	Rekomendasi kepada Organisasi Sosial/ Panti Sosial yang berada di Desa/Kelurahan dalam hal pendaftaran baru/ ulang	
20	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Pembentukan, Pemekaran, Penggabungan dan Penghapusan Desa dan Kelurahan	
21	Rekomendasi Perangkat Desa	
22	Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kerja Sama Pembangunan antar Kecamatan/ Desa dengan Swasta dalam Skala Kabupaten di Kecamatan	
23	Rekomendasi Pembentukan Kelembagaan Perkumpulan Petani Pemakai Air (P3A)	
24	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
25	Fasilitasi Surat Keterangan Ahli Waris	

Meskipun kenaikan Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2024 masih dalam Nilai Perkiraan yang tidak terlalu signifikan yaitu dari Target yang direncanakan sebesar 86,00 Point sedangkan realisasi sebesar 91,70 Point = 106,63%, dan capaian Tahun ini masih belum mengakomodir seluruh layanan yang dilaksanakan oleh Kecamatan Pasirjambu.

Di Tahun 2025 Kecamatan Pasirjambu menetapkan target capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 87,00 Point dan mengingat adanya beberapa penambahan jenis layanan yang diakomodir oleh e-SKM. Apabila melihat dari beberapa sumber baik tabel maupun grafik yang telah disajikan diatas dapat disimpulkan bahwa Indikator Nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) Kecamatan Pasirjambu terus mengalami peningkatan dan telah berhasil menunjukkan kinerja yang baik sehingga melebihi target yang telah ditetapkan, Capaian Nilai Indek Kepuasan Masyarakat Tahun 2024 sampai dengan saat ini (Pertanggal 14 Juni 2024) sudah tercapai nilai Indek Kepuasan Masyarakat (IKM) sebesar 88,74 Point dan diperkirakan s/d Desember 2024 akan mencapai Nilai sebesar lebih dari 91,70 Point.

Pencapaian ini merupakan hasil dari perencanaan efektivitas serapan anggaran dan kekompakan dalam pelaksanaan pekerjaan baik pada level Struktural maupun pada level Pelaksana dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat di seluruh bidang yang menjadi tugas dan kewenangan Kecamatan Pasirjambu. Selain itu, pencapaian ini adalah hasil dari kesiapan seluruh elemen dalam mengevaluasi dan menindaklanjuti keluhan dan aspirasi masyarakat.

**(4). Persentase Desa Beradministrasi Baik**

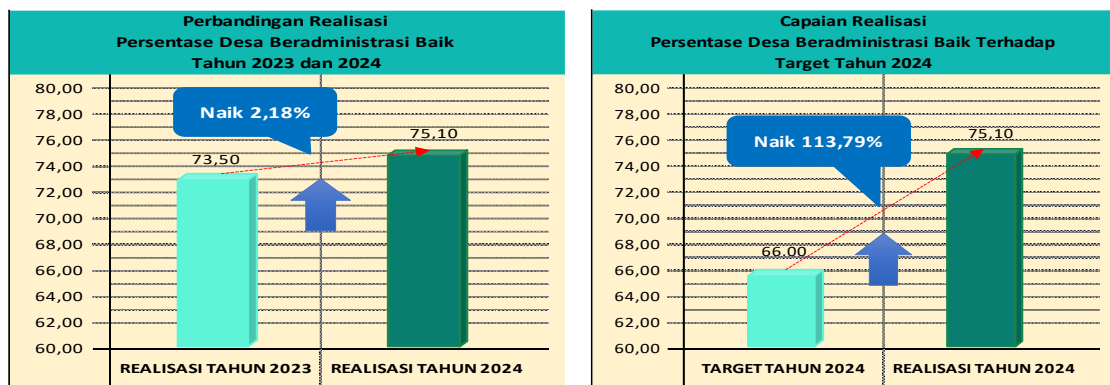
Indikator Persentase Desa Beradministrasi Baik merupakan salah satu indikator yang baru masuk di Tahun 2024 dari Tujuan PD **“Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik”** dan Sasaran Strategis Kecamatan Pasirjambu yaitu **“Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa”**.

Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi serta pertanggungjawaban dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka Persentase Desa Beradministrasi Baik dipandang perlu untuk dijadikan indikator keberhasilan dalam mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Adapun Nilai Persentase Desa Beradministrasi Baik Tahun 2024 ini belum final dan masih Nilai prediksi (perkiraan) dikarenakan penilainya sampai dengan saat ini masih berjalan, akan tetapi kami perlu membanding realisasi dengan tahun sebelumnya sehingga kami memprediksi nilai Persentase Desa Beradministrasi Baik Tahun 2024 sebagaimana terlihat pada gambar berikut ini :

**Gambar 2.8**

**Capaian Persentase Desa Beradministrasi Baik Tahun 2024**



*Catatan Nilai ini belum final dikarenakan penilaian Persentase Desa Beradministrasi Baik masih berjalan*

Kalau dilihat dari gambar 2.8 diatas Capaian Persentase Desa Beradministrasi Baik mengalami peningkatan capaian sebesar 113,79% dari target yang telah ditetapkan pada Tahun 2024 sebesar 66,00 dan realisasi capaian Tahun 2024 sebesar 75,10%, kenaikan tersebut ditunjang oleh keseriusan dan semangat kinerja TIM monitoring dan evaluasi yang selalu berkomitmen untuk lebih meningkatkan kualitas kerjanya sehingga mendapatkan hasil yang diharapkan, meskipun dari hasil temuan monitoring dan evaluasi Tim masih ada yang belum ditindaklanjuti terutama dalam pertanggungjawaban / pengelolaan administrasi Desa dan belum sepenuhnya dijadikan bahan perbaikan dan perumusan kebijakan.

Kecamatan Pasirjambu berdasarkan hasil penelaahan visi dan misi Kepala Daerah mengemban tugas dalam penyelesaian misi ke-4 yaitu

*“Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”*. Indikator-indikator yang telah dijelaskan diatas adalah ukuran yang menentukan berhasil atau tidaknya pencapaian kinerja sasaran yang secara eksplisit berdampak pada pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Bandung berdasarkan *cascading* kinerja Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirjambu terhadap Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Kabupaten Bandung.

Selanjutnya, diperlukan identifikasi faktor penghambat dan pendorong terhadap pencapaian visi dan misi sebagai masukan terhadap perumusan strategi pencapaian kinerja Kecamatan Pasirjambu. Pada RKPD 2025 Kabupaten Bandung, Bupati Bandung telah mencanangkan program-program wajib untuk mewujudkan visi dan misi Kabupaten Bandung 2021-2026. Program-program tersebut dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah berdasarkan tugas dan fungsinya masing-masing.

Faktor penghambat dan faktor pendorong dapat dilihat pada tabel 2.7 berikut ini :

**Tabel 2.7**  
**Faktor Penghambat dan Pendorong Pelayanan Kecamatan Pasirjambu Terhadap Pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah**

<b>Visi :</b>		
<b>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera.</b>		
<b>Misi 4 :</b>		
<b>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan.</b>		
<b>Prioritas Pembangunan :</b>		
<b>Reformasi Birokrasi Integratif, Inovatif dan Dinamis</b>		
No.	Faktor	
	<i>Penghambat</i>	<i>Pendorong</i>
1	❖ Kurang optimalnya keselarasan pencapaian target realisasi kinerja dan anggaran seta tidak adanya keseragaman rumus perhitungan terutama bagi indikator tertentu	❖ Komitmen, semangat, motivasi baik, dari pimpinan yang kuat untuk mencapai target pencapaian Nilai AKIP yang lebih baik, yang tumbuh dari tahun ke tahun serta penekanan evaluasi dan tindak lanjut hasil LHE Inspektorat dengan tepat waktu.

	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kurang optimalnya Penyusunan Perubahandokumen-dokumen perencanaan, baik kinerja maupun anggaran dalam bidang kesekretariatan maupun sektoral.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Kemauan dan kerja keras serta Komitmen dari pimpinan yang kuat untuk membuat dan melaksanakan manajemen risiko dalam pengendalian kinerja seluruh lini yang menopang kinerja Kecamatan Pasirjambu.</li> </ul>
2	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masih kurangnya kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan Pemerintahan</li> <li>❖ Kurang optimalnya kinerja Kecamatan dalam pelaksanaan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Adanya sinergitas yang baik antara Pemerintah Kecamatan Pasirjambu dengan Perangkat Daerah terkait dalam hal pelayanan kepada masyarakat.</li> <li>❖ Inisiasi sosialisasi, penjelasan tentang pelayanan pemerintahan kepada masyarakat melalui media-media sosial yang mudah dijangkau oleh masyarakat serta melalui bimbingan teknis atau kegiatan lainnya.</li> <li>❖ Komitmen yang tinggi dari pimpinan untuk melaksanakan pelimpahan kewenangan Bupati kepada Camat</li> </ul>
3	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Masih kurangnya raihan pencapaian Desa Beradministrasi Baik.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>❖ Komitmen yang tinggi antara Pemerintah Kecamatan dengan Kepala Desa dalam hal peningkatan kualitas sumber daya aparatur Desa.</li> <li>❖ Komitmen yang tinggi antara Pemerintah Kecamatan sebagai fasilitator dengan Kepala Desa dalam hal pelaksanaan perundang- undangan terkait pengelolaan keuangan dan aset Desa.</li> </ul>

Rencana Kinerja Perangkat Daerah (RKPD) Tahun 2025 telah memetakan analisis *Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats* (SWOT) berdasarkan pendekatan kewilayahan pada masing-masing wilayah Kecamatan. Menurut Freddy (2013), analisis SWOT adalah analisa yang didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan dan peluang, namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan dan ancaman. Gambar berikut ini menjabarkan kondisi Kecamatan Pasirjambu sesuai dengan analisis SWOT sebagai dasar untuk penentuan program yang akan dilaksanakan sebagai wujud pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu dalam menyelesaikan isu strategis Kabupaten Bandung.

Gambar 2.9  
Analisis SWOT Kewilayahan Kecamatan Pasirjambu



Sumber Data : Kasi Pemerintahan / Sosbud Kecamatan Pasirjambu

Dari analisis SWOT tersebut menghasilkan rekomendasi kebijakan untuk menyelesaikan isu strategis yang diharapkan dapat menjadi basis perencanaan yang mendukung program mandatori kewilayahan pada tahun 2025 yaitu :

1. Peningkatan kualitas infrastruktur wilayah untuk mendorong pengembangan wilayah seperti akses jalan, irigasi, infrastruktur pertanian, sanitasi, pengelolaan sampah.
2. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan Pendidikan (terutama program penyetaraan Pendidikan) dan Pelatihan Ketenagakerjaan.
3. Peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan kesehatan, layanan KB dan pengendalian penduduk.
4. Peningkatan jaringan kerjasama usaha pelaku ekonomi melalui kemitraan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya.

Menindaklanjuti rekomendasi tersebut, Kecamatan Pasirjambu sesuai tugas dan fungsinya merencanakan pelaksanaan Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik untuk mengatasi masalah sarana dan prasarana khususnya dalam hal peningkatan koordinasi dengan Perangkat Daerah yang terkait dalam sarana dan prasarana pelayanan umum. Selain itu, Kecamatan Pasirjambu merencanakan pelaksanaan pelimpahan sebagian kewenangan dari bupati kepada camat dalam hal fasilitasi peningkatan peran serta masyarakat di bidang pendidikan dan fasilitasi perencanaan, penetapan, dan peningkatan kualitas SDM melalui peningkatan layanan pendidikan terutama program penyetaraan pendidikan.

Selain 2 program tersebut. Kecamatan Pasirjambu merencanakan Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan khususnya dalam hal koordinasi

kegiatan pemberdayaan desa. Koordinasi tersebut dilaksanakan dalam rangka peningkatan efektifitas kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah Kecamatan untuk pelaksanaan Forum Koordinasi Kecamatan Sehat (FKKS), fasilitasi kegiatan-kegiatan percepatan penurunan *stunting*.

Dalam rangka peningkatan jaringan kerjasama usaha pelaku ekonomi melalui kemitraan dan pemberdayaan UMKM dan Koperasi serta pelaku ekonomi lainnya, Kecamatan Pasirjambu merencanakan kegiatan fasilitasi pengembangan usaha ekonomi masyarakat dan fasilitasi pengembangan teknologi tepat guna untuk memfasilitasi program bupati terkait pengembangan ekonomi kewilayahan dan pembinaan teknologi tepat guna tingkat Kecamatan

#### **2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD**

Terdapat penyesuaian tolok ukur kinerja serta anggaran sesuai analisis kebutuhan terhadap RKPD Tahun 2025. Review lengkap terhadap RKPD Tahun 2025 berkaitan dengan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan yang akan dilaksanakan pada Tahun Anggaran 2025. Rumusan kebutuhan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan dilengkapi dengan lokasi, indikator kinerja, besaran target / tolok ukur, dan yang terpenting adalah besaran pagu anggaran yang dibutuhkan agar bisa disesuaikan dengan hasil analisis kebutuhan dilapangan.

Pada Tahun Anggaran 2025 Review Rancangan Awal RKPD terhadap hasil analisis kebutuhan dapat disampaikan melalui Tabel TC.31, sebagai berikut :



**Tabel 2.8**  
**TC.31 Review Terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2025**  
**Provinsi Jawa Barat Kabupaten Bandung**

**NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PASIRJAMBU**

NOMOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2025			PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD TAHUN 2025				
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF (RP)			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	TARGET CAPAIAN	KEBUTUHAN DANA (RP)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN PASIRJAMBU	1. NILAI AKIP 2. Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	69,50 98,50	Point Persen	4.275.348.731,00	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	KECAMATAN PASIRJAMBU	1. NILAI AKIP 2. Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	70,00 98,50	Point Persen	6.861.299.731,00
1,1	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100	Persen	60.999.000,00	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	100	Persen	89.000.000,00
1.1.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	2.000.000,00	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	6	Dokumen	5.000.000,00
1.1.2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	1	Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000,00
1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	6	Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	4	Dokumen	5.000.000,00
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	1	Dokumen	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	2	Dokumen	5.000.000,00
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	6	Dokumen	1.999.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	4	Dokumen	5.000.000,00
1.1.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	2.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	2	Laporan	5.000.000,00
1.1.7	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Laporan		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	10.000.000,00
1.1.7	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	24.500.000,00	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	1	Dokumen	24.500.000,00
1.1.8	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	24.500.000,00	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	1	Data	24.500.000,00
1,2	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100	Persen	3.827.729.731,00	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	100	Persen	3.828.229.731,00
1.2.1	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228	Orang/Bulan	3.813.229.731,00	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	228	Orang/Bulan	3.813.229.731,00
1.2.2	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	5.000.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	2	Laporan	5.000.000,00
1.2.3	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4	Laporan	4.500.000,00	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	4	Laporan	5.000.000,00
1.2.4	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	4	Dokumen	5.000.000,00	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	Dokumen	5.000.000,00



# PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU

# RENJA 2025

<b>1,3</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>5.000.000,00</b>
1.3.1	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	5.000.000,00	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	5.000.000,00
<b>1,4</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>5.000.000,00</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>39.750.000,00</b>
1.4.1	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Paket		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	23	Paket	17.250.000,00
1.4.2	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	5.000.000,00	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	1	Dokumen	5.000.000,00
1.4.3	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	-	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	40	Orang	10.000.000,00
1.4.4	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan		Orang	-	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	45	Orang	7.500.000,00
<b>1,5</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>118.000.000,00</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>118.000.000,00</b>
1.5.1	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12.000.000,00	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	12	Paket	12.000.000,00
1.5.2	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	60.000.000,00	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	6	Paket	60.000.000,00
1.5.3	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	5.000.000,00	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	10	Paket	5.000.000,00
1.5.4	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	15.000.000,00	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	20	Paket	15.000.000,00
1.5.5	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.000.000,00	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	12	Paket	6.000.000,00
1.5.6	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	20.000.000,00	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	12	Laporan	20.000.000,00
<b>1,6</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>10.000.000,00</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>10.000.000,00</b>
1.6.1	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	10.000.000,00	Pengadaan Mebel	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	3	Unit	10.000.000,00
<b>1,7</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>211.120.000,00</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>233.820.000,00</b>
1.7.1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan	1.500.000,00
1.7.2	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	13.000.000,00	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	34.200.000,00
1.7.3	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	198.120.000,00	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	198.120.000,00



<b>1,8</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik</b>	<b>95.50</b>	<b>Persen</b>	<b>37.500.000,00</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik</b>	<b>98.50</b>	<b>Persen</b>	<b>2.537.500.000,00</b>
1.8.1	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	15.000.000,00	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	15.000.000,00
1.8.2	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	7.500.000,00	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	5	Unit	7.500.000,00
1.8.3	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	Unit	15.000.000,00	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	Unit	15.000.000,00
1.8.4	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		Unit		Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	2	Unit	2.500.000.000,00
<b>JUMLAH 1</b>						<b>4.275.348.731,00</b>						<b>6.861.299.731,00</b>
<b>2</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>KECAMATAN PASIRJAMBU</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	<b>87</b>	<b>Persen</b>	<b>379.664.000,00</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>KECAMATAN PASIRJAMBU</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	<b>88</b>	<b>Persen</b>	<b>379.664.000,00</b>
<b>2,1</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>25.000.000,00</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>25.000.000,00</b>
2.1.1	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Dokumen	25.000.000,00	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	1	Dokumen	25.000.000,00
<b>2,2</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>354.664.000,00</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>		<b>Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>354.664.000,00</b>
2.2.1	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	Dokumen	4.664.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	1	Dokumen	4.664.000,00
2.2.2	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	350.000.000,00	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	12	Laporan	350.000.000,00
<b>3</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN PASIRJAMBU</b>	<b>Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>228.001.000,00</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>KECAMATAN PASIRJAMBU</b>	<b>Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>228.001.000,00</b>
<b>3,1</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>98.002.200,00</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>98.002.200,00</b>
3.1.1	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	12	Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
3.1.2	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.002.200,00	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	12	Laporan	93.002.200,00



# PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU

# RENJA 2025

3.2	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>39.998.800,00</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>39.998.800,00</b>
3.2.1	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Lembaga Kemasyarakatan	14.998.800,00	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	4	Lembaga Kemasyarakatan	14.998.800,00
3.2.2	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	15.000.000,00	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	1	Laporan	15.000.000,00
3.2.3	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	10.000.000,00	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	1	Laporan	10.000.000,00
3.3	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>90.000.000,00</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>90.000.000,00</b>
3.3.1	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10	Keluarga	7.500.000,00	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	10	Keluarga	7.500.000,00
3.3.2	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10	Keluarga	7.500.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	10	Keluarga	7.500.000,00
3.3.3	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10	Keluarga	7.500.000,00	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	10	Keluarga	7.500.000,00
3.3.4	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10	Keluarga	7.500.000,00	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	10	Keluarga	7.500.000,00
3.3.5	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10	Keluarga	7.500.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	10	Keluarga	7.500.000,00
3.3.6	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10	Keluarga	7.500.000,00	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	10	Keluarga	7.500.000,00
3.3.7	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10	Keluarga	7.500.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	10	Keluarga	7.500.000,00



3.3.8	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10	Keluarga	7.500.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	10	Keluarga	7.500.000,00
3.3.9	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10	Keluarga	7.500.000,00	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	10	Keluarga	7.500.000,00
3.3.10	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10	Keluarga	7.500.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	10	Keluarga	7.500.000,00
3.3.11	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10	Keluarga	7.500.000,00	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	10	Keluarga	7.500.000,00
3.3.12	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10	Keluarga	7.500.000,00	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	10	Keluarga	7.500.000,00
4	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>KECAMATAN PASIRJAMBU</b>	<b>Persentase Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>50.000.000,00</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>KECAMATAN PASIRJAMBU</b>	<b>Persentase Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>50.000.000,00</b>
4,1	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>35.000.000,00</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>35.000.000,00</b>
4.1.1	Sinergitas dengan kepolisian Negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	10.000.000,00	Sinergitas dengan kepolisian Negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	1	Laporan	10.000.000,00
4.1.2	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	25.000.000,00	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	1	Laporan	25.000.000,00
4,2	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>15.000.000,00</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>100</b>	<b>Persen</b>	<b>15.000.000,00</b>
4.2.1	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	15.000.000,00	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pasirjambu	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	12	Laporan	15.000.000,00





## 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kecamatan Pasirjambu telah melaksanakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Tingkat Kecamatan pada Tahun 2023 untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan Tahun 2025. Dan berdasarkan hasil pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tersebut tidak terdapat Usulan Program dan Kegiatan dari masyarakat maka untuk Tabe 2.8-TC.32 Nihil.

**Tabel 2.9 – TC.32**  
**Usulan Program dan Kegiatan**  
**dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2025**  
**Kabupaten Bandung**

NAMA PERANGKAT DAERAH : KECAMATAN PASIRJAMBU

NO MOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	LOKASI	HASIL ANALISIS KEBUTUHAN RKPD TAHUN 2025				CATATAN PENTING
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN		TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	
			INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	HASIL MAPPING INDIKATOR KINERJA PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN NOMENKLATUR 050 TAHUN 2023			
1	2	3	4	5	6	7	8
			<b>N I H I L</b>				

### BAB III

## TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

### 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2025 terdapat beberapa isu strategis, salah satunya adalah rendahnya kualitas implementasi dan belum optimalnya kualitas dan kuantitas partisipasi dalam pelayanan publik. Oleh karena itu, pemerintah pusat mencanangkan salah satu agenda pembangunan yaitu **memperkuat stabilitas polhukam dan transformasi pelayanan publik** untuk menyelesaikan isu strategis tersebut.

Kabupaten Bandung dalam mendukung agenda pembangunan nasional tersebut mencanangkan misi **mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang professional dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan**. Pemerintah adalah salah satu aktor utama dalam pembangunan. Konsep tata kelola pemerintahan dengan prinsip *good governance* sudah sering digalakkan baik dalam skala pusat, provinsi dan kabupaten/ kota dalam satu dekade terakhir. Dalam melengkapi konsep *good governance* yang masih terus diupayakan, penerapan konsep *dynamic governance* dirasa penting untuk diadakan. Konsep tata pemerintahan yang dinamis adalah mencoba menciptakan pemerintahan yang selalu adaptif terhadap dinamika perubahan dan tantangan yang selalu berubah setiap waktunya.

Dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan dinamis maka perlu adanya dorongan beberapa faktor yaitu meningkatnya kualitas *e-government* melalui peningkatan kualitas kinerja aparatur, tata kelola pemerintahan, dan penyelenggaraan pelayanan publik, dan peningkatan kinerja pengelolaan keuangan daerah. Selain itu, dalam mewujudkan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan, pemerintah daerah perlu menciptakan stabilitas lingkungan bermasyarakat yang religius dan kondusif dengan cara meningkatkan ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Dorongan-dorongan terhadap beberapa faktor tersebut merupakan tugas dan fungsi kewilayahan yang dilaksanakan Kecamatan Pasirjambu dalam lingkup wilayahnya.

Untuk mencegah kesimpangsiuran pemahaman, maka Dokumen Perencanaan disusun mulai dari dan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), RPJPD, RPJMD, Renstra, dan RKPD yang diaktualisasikan melalui Penyusunan Perubahan Renja (RENJA) SKPD, selanjutnya diimplementasikan ke dalam Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD).

Sesuai dengan kerangka pemikiran tersebut di atas, Rancangan Akhir Perubahan Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 dalam proses Penyusunan PerubahanRenja harus memperhatikan kebijakan-kebijakan yang dilaksanakan baik oleh pemerintah pusat, maupun pemerintah provinsi,dan pemerintah kabupaten.

Dalam sistem penganggaran selama ini, keterlibatan Kecamatan Pasirjambu adalah pada awal proses dalam bentuk penetapan pagu indikatif sehingga perannya dalam pengendalian dan evaluasi pembangunan relatif terbatas. Ke depan, Kecamatan Pasirjambu diharapkan dapat terlibat penuh dalam sistem penganggaran untuk menjamin konsistensi antara perencanaan dan penganggaran serta pelaksanaannya.

### 3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

Dalam rangka mewujudkan **Misi Nomor 4** Kabupaten Bandung, yaitu **“Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan”** maka perlu dijabarkan kembali ke dalam tujuan dan sasaran strategis yang lebih operasional yang dituangkan dalam Renja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025.

Untuk lebih jelasnya kami sajikan tabel tujuan dan sasaran strategis Kecamatan Pasirjambu sebagai berikut :

**Tabel 3.1**  
**Tujuan, Sasaran, Indikator dan Target Tahun 2025**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Target
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Daerah	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP)	69,50
			Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	98,50
2	Meningkatnya Kualitas pelayanan Publik	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Indek Kepuasan Masyarakat (IKM)	87,00
		Meningkatnya Kualitas pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	2

### 3.2.1 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah

Berdasarkan kajian-kajian yang terdapat pada RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 terdapat tantangan-tantangan dalam pembangunan yang masih dihadapi, maka dalam kurun waktu periode Tahun 2021-2026 ditetapkan Visi Pembangunan Kabupaten Bandung yaitu “**Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis dan Sejahtera.**”

Penjabaran dari Visi Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

**Bangkit:** Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit adalah memberdayakan masyarakat menuju perubahan sosial ekonomi secara nyata dan bertahap melalui program pembangunan yang dirancang secara sektoral dan regional yang berdampak signifikan terhadap penanggulangan kemiskinan dan peningkatan daya beli.

**Edukatif:** Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Edukatif, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat dan aparatur memiliki motivasi, semangat, dan etos kerja yang prima atau *Bedas* di segala bidang untuk kemajuan Kabupaten Bandung.

**Dinamis:** Terwujudnya Pembangunan Kabupaten Bandung yang Dinamis, yang dimaksud adalah terselenggaranya kegiatan pembangunan baik fisik maupun non fisik di Kabupaten Bandung yang memperhatikan kaidah- kaidah pembangunan yang berwawasan lingkungan, yang memperhatikan tata ruang dan keseimbangan alam. Pembangunan berkelanjutan juga diartikan sebagai: (i) Pembangunan yang menjaga peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan; (ii) Pembangunan yang menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat dan Pembangunan yang menjaga kualitas lingkungan hidup masyarakat dengan tata kelola pelaksanaan pembangunan yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi berikutnya.

**Agamis:** Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Agamis, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang masyarakatnya dan aparaturnya bersih dan berwibawa berakhlak mulia berlandaskan nilai-nilai keagamaan.

**Sejahtera:** Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Sejahtera, yang dimaksud adalah kondisi masyarakat Kabupaten Bandung yang dapat terpenuhi kebutuhan dasar meliputi sandang, pangan, papan dan memperoleh pelayanan dasar pendidikan dan kesehatan secara layak serta terbukanya

kesempatan kerja yang luas dan mampu menyerap tenaga kerja dengan penghasilan memadai.

Berdasarkan Visi pembangunan yang ada, berikut adalah Misi-misi pembangunan yang ada dalam mewujudkan Visi pembangunan. Misi pembangunan berikut akan menjadi acuan dalam pembuatan program serta kegiatan dalam 5 (lima) Tahun kedepan :

1. Membangkitkan Daya Saing Daerah.
2. Menyediakan layanan pendidikan dan kesehatan yang berkualitas dan merata
3. Mengoptimalkan pembangunan daerah berbasis partisipasi masyarakat yang menjunjung tinggi kreativitas dalam bingkai kearifan lokal.
4. Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan.
5. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan prinsip keadilan dan keberpihakan pada kelompok masyarakat lemah.

Berdasarkan hasil penelaahan visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut, Kecamatan Pasirjambu akan menyelesaikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai Misi ke 4, yaitu : ***“Mengoptimalkan tata kelola pemerintahan melalui birokrasi yang profesional, dan tata kehidupan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai keagamaan”***.

### **3.2.2 Penentuan Isu Strategis Perangkat Daerah**

Isu strategis berdasarkan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah adalah kondisi yang menjadi perhatian karena dampaknya yang signifikan terhadap perangkat daerah dimasa yang datang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya.

Isu strategis merupakan permasalahan yang berkaitan dengan fenomena atau belum dapat diselesaikan pada periode lima tahun sebelumnya dan memiliki dampak jangka panjang bagi keberlanjutan pelaksanaan pembangunan sehingga perlu diatasi secara bertahap. Berdasarkan identifikasi permasalahan-permasalahan dan hasil telaahan lainnya, maka isu strategis yang berkaitan langsung dengan pelayanan di Kecamatan Pasirjambu, yaitu :

- 3.3.1 Kurang optimalnya *Kualitas Kinerja Aparatur dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik.*
- 3.3.2 Kurang optimalny *Akualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan.*
- 3.3.3 Kurang optimalnya *Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa.*

### 3.2.3 Penentuan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berdasarkan telaahan visi dan misi Kepala Daerah terpilih, agar visi dan misi tersebut dapat diwujudkan serta sebagai upaya penyelesaian isu strategis yang telah dirumuskan, maka Kecamatan Pasirjambu menetapkan tujuan dan sasaran jangka menengah berdasarkan pada sasaran yang ingin dicapai dalam RPJMD Kabupaten Bandung Tahun 2021-2026 yang berpedoman kepada visi dan misi bupati. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026 merupakan penjabaran dari tujuan yang telah ditetapkan.

Uraian tujuan dan sasaran jangka menengah pelayanan Kecamatan Pasirjambu pada periode tahun 2021-2026 terperinci dalam gambar dan tabel berikut ini :

**Gambar 3.2  
Cascading RPJMD terhadap Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**



Dari gambar diatas dapat diketahui bahwa Kecamatan Pasirjambu memiliki 2 (dua) tujuan jangka menengah yaitu :

1. Meningkatkan Akuntabilitas Pemerintah Daerah;
2. Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik.

Tujuan pertama ditekankan pada peningkatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah. Untuk mencapai tujuan ini Kecamatan Pasirjambu menentukan sasaran yaitu “Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik” yang bermakna bahwa Kecamatan Pasirjambu harus mampu memastikan kualitas kinerja pelayanan meningkat dari tahun ke tahun melalui peningkatan kualitas penyelenggara pelayanan publik. Keberhasilan dari sasaran tersebut diukur dari pencapaian indikator kinerja Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) dari segi penguatan akuntabilitas kinerja. Penguatan tersebut dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Selain dari nilai AKIP, salah satu unsur penting dalam memberikan pelayanan kepadamasyarakat yaitu ketersediaan Barang Milik Daerah dalam kondisi baik yang diukur dari pencapaian persentase BMD dalam kondisi baik.

Tujuan kedua ditekankan pada peningkatan kualitas pelayanan publik. Untuk mencapai tujuan ini Kecamatan Pasirjambu menentukan 2 (dua) sasaran yaitu Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan dan Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa

Indikator kinerja untuk mengukur keberhasilan pencapaian sasaran pertama yaitu dengan mengukur nilai kepuasan masyarakat yang dilaksanakan melalui pengukuran Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Pengukuran tersebut dilaksanakan melalui metode survey yaitu Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) yang dilaksanakan secara komperhensif dengan tujuan mengukur tingkat kepuasan masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari penyelenggara pelayanan publik.

Peningkatan kualitas pelayanan publik tidak serta merta hanya diukur dari sisi kepuasan masyarakat saja, namun harus diukur dari kualitas pemerintahan desa yang langsung berhadapan melayani masyarakat. Persentase Desa Beradministrasi Baik merupakan indikator untuk mengukur sejauh mana kualitas pemerintahan desa telah dicapai. Dalam rangka mewujudkan tertib administrasi desa yang mampu berfungsi sebagai sumber data dan informasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat maka Persentase Desa Beradministrasi Baik dipandang perlu untuk dijadikan indikator keberhasilan dalam mensukseskan pencapaian tujuan dan sasaran Perangkat Daerah.

Tujuan dan Sasaran tersebut perlu ditindaklanjuti dengan penentuan strategi disertai arah kebijakan yang relevan untuk pencapaiannya. Tabel berikut ini merupakan matriks arah kebijakan terhadap tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirjambu.

**Tabel 3.3**  
**Matriks Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan**  
**Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025**

<b>Visi :</b>	<i>Terwujudnya Masyarakat Kabupaten Bandung yang Bangkit, Edukatif, Dinamis, Agamis, dan Sejahtera</i>		
<b>Misi 4 :</b>	<i>Mengoptimalkan Tata Kelola Pemerintahan melalui Birokrasi yang Profesional, dan Tata Kehidupan Masyarakat yang Berlandaskan Nilai-nilai Keagamaan</i>		
<b>TUJUAN</b>	<b>SASARAN</b>	<b>STRATEGI</b>	<b>ARAH KEBIJAKAN</b>
Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintahan Pemerintah Kecamatan Pasirjambu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Meningkatkan Kualitas Penyelenggaraan Pelayanan Publik	Peningkatan kualitas dan kapasitas aparatur serta mengoptimalkan sistem pelayanan publik melalui peningkatan kualitas implementasi SAKIP di Kecamatan Pasirjambu
Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	Optimalisasi peningkatan kualitas pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan melalui perbaikan pelaksanaan pelayanan publik yang berkelanjutan
			Peningkatan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum melalui koordinasi yang sinergis dengan instansi terkait trantibum dan seluruh tokoh elemen masyarakat
			Optimalisasi peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan
	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	Meningkatkan Kualitas Pemberdayaan Kelembagaan Desa dalam Pengembangan Masyarakat Desa	Optimalisasi koordinasi pemberdayaan masyarakat melalui peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan
Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan Desa		Optimalisasi peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan Desa melalui pembinaan berkelanjutan dalam upaya peningkatan capaian Indeks Desa membangun	

#### **3.2.4 Indikator Kinerja Turunan Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah**

Untuk memperjelas Kerangka Kerja dari Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah maka diperlukan penentuan Indikator Kinerja dari Turunan Tujuan dan Sasaran yang hendak dicapai.

Berikut ini kami sajikan Tabel 3.4 yang merupakan Matriks Indikator Kinerja dari Tujuan dan Sasaran beserta turunannya



Tabel 3.4  
Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah  
Kecamatan Pasirjambu

NO	TUJUAN	SASARAN	PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR					KETERANGAN
				ULTIMATE OUTCOME	INTERMEDIATE OUTCOME	IMMEDIATE OUTCOME	OUTPUT / INDIKATOR	PROSES	
1	Meningkatnya Akuntabilitas Pemerintah Kecamatan Pasirjambu	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggara Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN KABUPATEN/KOTA	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kecamatan Pasirjambu					1. Nilai AKIP 2. Persentase BMD Dalam
1.1	Tersusunnya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD	Tersedianya dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja PD yang disusun sesuai ketentuan	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai ketentuan dan tepat waktu		
						Jumlah Penggunaan Perencanaan Kinerja sebagai Acuan dalam Proses Penganggaran			
						Persentase dokumen pelaporan kinerja. yang disusun sesuai ketentuan			
1.1.1	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Pembuatan dan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Tepat Waktu	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah			Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Dokumen yang memenuhi standar yang berlaku		Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
1.1.2	Tersusunnya Dokumen RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD					Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	



1.1.3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD					Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	
1.1.4	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD					Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	
1.1.5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA- SKPD					Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	
1.1.6	Tersusunnya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD sesuai ketentuan	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		<b>Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja</b>	Jumlah Koordinasi dan Penyusunan Laporan dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD yang disusun sesuai ketentuan		Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
1.1.7	Tersusunnya Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah			Jumlah Hasil Pelaksanaan Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang disusun sesuai Ketentuan		Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	
1.1.8	Tersusunnya Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Terlaksananya Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah		<b>Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja</b>	Jumlah Dokumen dan Data Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah yang terkumpul		Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	
1.1.9	Tersusunnya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Terkumpulnya Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah					Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	



1,2	Tersusunnya dokumen administrasi keuangan	Tersedianya dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase dokumen administrasi keuangan yang disusun sesuai ketentuan					
1.2.1	Terpenuhinya gaji dan tunjangan ASN secara tepat waktu dan sesuai ketentuan	Terlaksananya pembayaran gaji dan tunjangan ASN sesuai ketentuan	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN								Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	
1.2.2	Tersusunnya laporan keuangan akhir tahun SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD secara tepat waktu	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD								Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	
1.2.3	Tersusunnya laporan keuangan periodik SKPD	Terlaksananya koordinasi dan penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulanan/semesteran SKPD	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD								Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan/Semesteran SKPD	
1.2.4	Tersedianya Laporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya laporan analisis prognosis realisasi anggaran	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran								Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	
1,3	Terlayananinya ASN pada layanan administrasi kepegawaian	Terlaksananya pelayanan administrasi kepegawaian sesuai ketentuan	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan	Persentase ASN yang tertangani pada layanan kepegawaian sesuai ketentuan					
1.3.1	Tersedianya Dokumen Hasil Kegiatan Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Terlaksananya Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai sesuai Ketentuan yang berlaku	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan		Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai		
1.3.2	Meningkatnya tingkat pengetahuan ASN tentang peraturan perundang-undangan	Terlaksananya sosialisasi peraturan perundang-undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan					Persentase Penggunaan Hasil Pengukuran Kinerja pada Pengambilan Keputusan terhadap Total Pengambilan Keputusan		Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		



						Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan			
1.3.3	Meningkatnya tingkat pengetahuan ASN tentang Teknis Implementasi peraturan perundang-undangan	Terlaksananya Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan sesuai kebutuhan dan ketentuan	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan			Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan		Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	
<b>1.4</b>	<b>Terpenuhinya kebutuhan umum perangkat daerah</b>	<b>Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pelayanan umum sesuai ketentuan</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat Daerah</b>	<b>Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu</b>	<b>Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal</b>	<b>Jumlah Pelaksanaan Tindak Lanjut atas Rekomendasi Hasil Evaluasi SAKIP sesuai ketentuan</b>	<b>Persentase pemenuhan pelayanan umum sesuai ketentuan</b>		
1.4.1	Terpenuhinya Kebutuhan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Terlaksananya penyediaan paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor sesuai kebutuhan	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor					Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	
1.4.2	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Terlaksananya penyediaan Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor sesuai kebutuhan	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor					Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan	
1.4.3	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Terlaksananya penyediaan paket Peralatan Rumah Tangga sesuai kebutuhan	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga					Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	
1.4.4	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Terlaksananya penyediaan Paket Bahan Logistik Kantor sesuai kebutuhan	Penyediaan Bahan Logistik Kantor					Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	
1.4.5	Terpenuhinya Kebutuhan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Terlaksananya penyediaan Paket Barang Cetak dan Penggandaan sesuai kebutuhan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan					Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	
1.4.6	Terpenuhinya Kebutuhan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Tersusunnya Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD sesuai ketentuan	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pelaporan Kinerja	Jumlah Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD yang diserenggarakan sesuai ketentuan	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD



1,5	Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Teredianya jasa penunjang urusan Pemerintah Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				Persentase pemenuhan kebutuhan jasa penunjang urusan pemerintahan sesuai kebutuhan		
1.5.1	Terpenuhinya kebutuhan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik sesuai kebutuhan ketentuan	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Perencanaan Kinerja	Jumlah Dokumen Perencanaan Kinerja yang memenuhi standar yang berlaku		Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	
1.5.2	Terpenuhinya kebutuhan jasa pelayanan umum kantor	Terlaksana dan terlaporkannya penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor sesuai kebutuhan dan ketentuan	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	
1,6	Tersedianya Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Terlaksananya Pengadministrasian Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah sesuai Ketentuan	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		
1.6.1	Terpenuhinya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD sesuai Ketentuan	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD					Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	
1,6	Terpenuhinya kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah sesuai kebutuhan dan ketentuan	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan kebutuhan		
1.6.1	Terpenuhinya kebutuhan mebeuler	Terlaksananya pengadaan mebel sesuai kebutuhan	Pengadaan Mebel					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	
1,7	Terpeliharanya barang milik daerah penunjang urusan pemerintah daerah	Terlaksananya pemenuhan kebutuhan pemeliharaan barang milik daerah urusan pemerintah daerah sesuai ketentua	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Kec. Pasirjambu	Nilai Evaluasi SAKIP Komponen Pengukuran Kinerja	Jumlah Pelaksanaan Pengukuran Kinerja yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan	Persentase BMD dalam Kondisi Baik		



1.7.1	Terpenuhinya ke Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan sesuai kebutuhan dan ketentuan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	
1.7.2	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya sesuai kebutuhan dan ketentuan	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	
1.7.3	Terpenuhinya kebutuhan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya					Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	
<b>2</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu</b>				<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	
2.1	<b>Terciptanya sinergitas dalam pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum</b>	<b>Terlaksananya Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum sesuai ketentuan</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum		
2.1.1	Terciptanya sinergitas dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Terlaksananya koordinasi sinergi dengan instansi yang terkait dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pelayanan umum	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum				Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum		
2.2	<b>Terselenggaranya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Terlaksananya Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat sesuai kewenangan yang dilimpahkan</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Persentase Pelaksanaan Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang Diselenggarakan Sesuai Dengan Ketentuan	Persentase urusan pelimpahan kepada camat yang dilaksanakan		
2.2.1	Terselenggaranya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan pelayanan perizinan non usaha sesuai ketentuan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha				Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan		



2.2.2	Terselenggaranya pelimpahan sebagian urusan Bupati kepada Camat	Terlaksananya urusan pemerintahan yang terkait dengan kewenangan lain yang dilimpahkan	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan					Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	
<b>3</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu</b>				<b>Persentase Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	
3.1	Terlaksananya upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum	Terciptanya sinergitas dan harmonisasi dengan pihak-pihak yang berkaitan dengan ketentraman dan ketertiban umum	Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum					Persentase koordinasi upaya penyelenggaraan ketertiban dan ketentraman umum	
3.1.1	Terciptanya sinergitas dengan pihak terkait dalam rangka menciptakan ketentraman dan ketertiban umum	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang mendukung sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah laporan hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	
3.1.2	Terciptanya harmonisasi dengan tokoh-tokoh masyarakat	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat					Jumlah laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	
3.2	Tegaknya Perda dan Perkada di lingkungan Kecamatan	Terciptanya sinergitas dengan pihak-pihak yang terkait dengan penegakan peraturan perundang-undangan	Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah					Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	
3.2.1	Terciptanya sinergitas dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Terlaksana dan Terlaporkannya Kegiatan Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat</b>	<b>Persentase Penegakan Perda dan Perkada yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>		Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	



4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu				Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah	
4,1	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai dengan kewenangan Kecamatan	Terselenggaranya Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat Kecamatan Pasirjambu	Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah terhadap Jumlah Penugasan	Persentase Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Umum yang Dilaksanakan Sesuai Ketentuan terhadap Jumlah Penugasan	Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah		
4.1.1	Meningkatnya Wawasan Kebangsaan Nasional masyarakat Kecamatan Pasirjambu	Terlaksananya Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional	Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional				Jumlah orang yang mengikuti Fasilitasi, Koordinasi, dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan Nasional		
4.1.2	Terciptanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa di Wilayah Kecamatan Pasirjambu	Terbinanya Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa		
4.1.3	Terciptanya Kerukunan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional di Lingkungan Kecamatan Pasirjambu	Terbinanya masyarakat dalam menciptakan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Pembinaan Kerukunan Antarsuku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional				Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional		
4.1.4	Menurunnya Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Tertangani dan dilaporkan penanganannya Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang - Undangan				Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan		
4.1.5	Terselenggaranya Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Terlaksana dan dilaporkan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan				Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan		
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN	Jumlah Desa Mandiri				Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan	
5,1	Terselenggaranya kegiatan pemberdayaan Desa	Terlaksananya Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa	Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa	Persentase pelaksanaan koordinasi kegiatan pemberdayaan desa		



5.1.1	Meningkatnya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Terlaksananya Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		pada Capaian Indeks Desa Membangun	yang Dibina		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa		
5.1.2	Meningkatnya Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan yang berkaitan dengan peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan					Jumlah Laporan Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan		
5.2	<b>Meningkatnya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Terselenggaranya Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)</b>					<b>Persentase pelaksanaan kegiatan pemberdayaan Desa</b>		
5.2.1	Meningkatnya Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Terlaksananya kegiatan peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan sesuai ketentuan	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	<b>Jumlah Desa Mandiri</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun</b>	<b>Persentase Lembaga Masyarakat dan Masyarakat Desa yang Dibina</b>		Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Diselenggarakan		
5.2.2	Berkembangnya Usaha Ekonomi Masyarakat Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat						Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	
5.2.3	Berkembangnya Teknologi Tepat Guna di wilayah Kecamatan	Terlaksana dan terlaporkannya kegiatan Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna	Fasilitasi Pengembangan Teknologi Tepat Guna						Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	
	<b>Meningkatnya Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Terselenggaranya Kegiatan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Jumlah Desa Mandiri</b>	<b>Jumlah Terlaksananya Kegiatan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga Menuju Desa Mandiri</b>	<b>Persentase Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan yang telah dicapai</b>	<b>Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>			



Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Terlaksananya Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat sesuai Ketentuan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	
Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Terlaksananya Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga sesuai Kebutuhan	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	
Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Terlaksananya Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah sesuai Ketentuan	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	
Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Terlaksananya Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing secara	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing					Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	



	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Berkelanjutan Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat secara Berkesinambungan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya secara Merata	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	
	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Terlaksananya Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup secara berkelanjutan	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam dengan Tepat Waktu dan Tepat sasaran	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	
	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Terlaksananya Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga dengan Tepat Waktu dan Tepat sasaran	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	
	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Terlaksananya Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas dengan Tepat Sasaran	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas				Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	
<b>6</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Jumlah Desa Mandiri</b>			<b>Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi</b>	



6,1	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa	Jumlah Desa Mandiri	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa pada Capaian Indeks Desa Membangun	Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi	Persentase Pelaksanaan Pembinaan Desa sesuai Ketentuan		
6.1.1	Terfasilitasinya Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan pengendalian Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa					Jumlah dokumen yang difasilitasi dalam rangka administrasi tata pemerintahan Desa	
6.1.2	Terfasilitasinya Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Terfasilitasi dan Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa					Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	
6.1.3	Terfasilitasinya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa					Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	
6.1.4	Terfasilitasinya Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Terfasilitasi dan terlaporkannya kegiatan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa					Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	



Pasirjambu, 20 April 2025  
Camat Pasirjambu

**MA KANIA, S.PT., M.I.L**  
NIP. 19780927 201001 2 008



### 3.3 Program dan Kegiatan

Sebagai perwujudan dalam mendukung prioritas pembangunan Kabupaten Bandung Tahun 2025, prioritas pembangunan daerah yang terkait dengan kegiatan operasional Kecamatan Pasirjambu adalah Peningkatan kualitas perencanaan melalui peningkatan profesionalisme aparatur

Kecamatan Pasirjambu dalam pembangunan dan peningkatan kualitas dokumen perencanaan yang dapat dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan anggaran daerah. Berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja 2025, pelaksanaan kinerja Kecamatan Pasirjambu Kabupaten Bandung Tahun 2025 ditunjang dengan Belanja Operasi yang anggarannya diperuntukan untuk Belanja Pegawai dan Belanja Barang dan Jasa sedangkan Belanja Modal diperuntukan untuk membiayai Belanja Modal Peralatan dan Mesin, lebih jelasnya dengan ini kami sajikan rincian besaran pagunya sebagai berikut :

**Tabel 3.5**  
**Rancangan Sebelum Perubahan**  
**Dokumen Pelaksanaan Penggeseran Anggaran (DPPA)**  
**Pendapatan Dan Belanja Daerah**  
**Satuan Kerja Perangkat Daerah Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025**

KODE REKENING			URAIAN	JUMLAH ANGGARAN (RP.)
5			<b>BELANJA DAERAH</b>	
5	1		<b>BELANJA OPERASI</b>	<b>5.214.623.064,56</b>
5	1	01	Belanja Pegawai	4.136.255.624,00
5	1	02	Belanja Barang dan Jasa	1.078.367.440,56
5	2		<b>BELANJA MODAL</b>	<b>86.994.500,00</b>
5	2	02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	86.994.500,00
			<b>Jumlah Belanja</b>	<b>5.301.617.564,56</b>
			<b>Total Surplus / (Defisit)</b>	<b>(5.301.617.564,56)</b>

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, Kecamatan Pasirjambu menetapkan rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Tahun 2025 yang terdiri dari 6 Program, 17 Kegiatan, dan 49 Sub Kegiatan dengan Total Anggaran sebesar Rp. **5.301.617.564,56**

Adapun Rumusan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 dan Prakiraan Maju Tahun 2025 dapat dilihat pada Tabel berikut ini :



**Tabel 3.6 - TC.33**  
**Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025**  
**dan Prakiraan Maju Tahun 2026**  
**Kabupaten Bandung**

Nama PD : Kecamatan Pasirjambu

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2026	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/ Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. NILAI AKIP 2. Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Pasirjambu	69,50 Point 98,50 Persen	4.807.491.184	APBD Kabupaten		69,50 Poin 98,50 Persen	7.301.154.592,00
7.01.01.2.01	<i>Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah</i>	<i>Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu</i>	<i>Kecamatan Pasirjambu</i>	<i>100</i>	<i>35.199.000</i>	<i>APBD Kabupaten</i>		<i>100%</i>	<i>80.000.000,00</i>
7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	6 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kabupaten		6 Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kabupaten		3 Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	3 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kabupaten		4 Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.01.0004	<i>Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD</i>	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kabupaten		2 Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	3 Dokumen	4.999.000,00	APBD Kabupaten		3 Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pasirjambu	4 Laporan	5.000.000,00	APBD Kabupaten		3 Laporan	5.000.000,00
7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah						1 Laporan	2.000.000,00
7.01.01.2.01.0008	<i>Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Kecamatan Pasirjambu</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>3.560.000,00</i>	<i>APBD Kabupaten</i>	<i>Sub Kegiatan Baru 2025</i>	<i>1 Dokumen</i>	<i>24.000.000,00</i>
7.01.01.2.01.0009	<i>Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah</i>	<i>Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah</i>	<i>Kecamatan Pasirjambu</i>	<i>1 Data</i>	<i>1.640.000,00</i>	<i>APBD Kabupaten</i>	<i>Sub Kegiatan Baru 2025</i>	<i>1 Data</i>	<i>24.000.000,00</i>



# PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU

## RENJA 2025

<b>7.01.01.2.02</b>	<b>Administrasi Keuangan Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>4.268.338.284</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>4.048.734.592,00</b>
7.01.01.2.02.0007	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pasirjambu	228 Orang/Bulan	4.253.838.284,00	APBD Kabupaten	228 Orang/Bulan	4.034.234.592,00
7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirjambu	2 Laporan	5.000.000,00	APBD Kabupaten	2 Laporan	5.000.000,00
7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kecamatan Pasirjambu	4 Laporan	4.500.000,00	APBD Kabupaten	4 Laporan	5.000.000,00
7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pasirjambu	4 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kabupaten	4 Dokumen	4.500.000,00
<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>5.000.000,00</b>
7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	5.000.000,00	APBD Kabupaten	1 Laporan	5.000.000,00
<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>3.530.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>81.500.000,00</b>
7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					42 Paket	31.500.000,00
7.01.01.2.05.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	3.530.000,00	APBD Kabupaten	1 Dokumen	5.000.000,00
7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu		0,00	APBD Kabupaten	40 Orang	5.000.000,00
7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu		0,00	APBD Kabupaten	45 Orang	40.000.000,00
<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>158.203.900</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>146.000.000,00</b>
7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Paket	12.000.000,00	APBD Kabupaten	12 Paket	18.000.000,00
7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	6 Paket	100.203.900,00	APBD Kabupaten	6 Paket	72.000.000,00
7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	10 Paket	5.000.000,00	APBD Kabupaten	10 Paket	5.000.000,00
7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	20 Paket	15.000.000,00	APBD Kabupaten	20 Paket	20.000.000,00
7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Paket	6.000.000,00	APBD Kabupaten	12 Paket	6.000.000,00
7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	20.000.000,00	APBD Kabupaten	12 Laporan	25.000.000,00
<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	<b>100%</b>	<b>45.200.000,00</b>
7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	3 Unit	10.000.000,00	APBD Kabupaten	3 Unit	45.200.000,00



# PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU

## RENJA 2025

<b>7.01.01.2.08</b>	<b>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>273.140.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>340.720.000,00</b>
7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan				1 Laporan	1.500.000,00
7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	18.220.000,00	APBD Kabupaten		12 Laporan	32.000.000,00
7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	254.920.000,00	APBD Kabupaten		12 Laporan	307.220.000,00
<b>7.01.01.2.09</b>	<b>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</b>	<b>Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>98.50</b>	<b>54.080.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>98,50 Persen</b>	<b>2.554.000.000,00</b>
7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Pasirjambu	5 Unit	15.000.000,00	APBD Kabupaten		7 Unit	44.000.000,00
7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pasirjambu	5 Unit	7.500.000,00	APBD Kabupaten		5 Unit	10.000.000,00
7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Pasirjambu	2 Unit	31.580.000,00	APBD Kabupaten		2 Unit	2.500.000.000,00
7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		Unit				Unit	
		<b>JUMLAH 1</b>			<b>4.807.491.184</b>				<b>7.301.154.592,00</b>
<b>7.01.02</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>INDEKS KEPUJASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>87,00</b>	<b>260.404.058</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>86,00 Poin</b>	<b>365.500.000,00</b>
<b>7.01.02.2.03</b>	<b>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>22.900.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>10.500.000,00</b>
7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	22.900.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	10.500.000,00
<b>7.01.02.2.04</b>	<b>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</b>	<b>Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>237.504.058</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>355.000.000,00</b>
7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	4.664.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	5.000.000,00
7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	232.840.058,00	APBD Kabupaten		12 Laporan	350.000.000,00
<b>7.01.03</b>	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>197.962.500</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>308.000.000,00</b>
<b>7.01.03.2.01</b>	<b>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>144.117.200</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>155.000.000,00</b>
7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pasirjambu	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	APBD Kabupaten		12 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00
7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan	Kecamatan	12 Laporan	139.117.200,00	APBD		12 Laporan	150.000.000,00



	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Pasirjambu			Kabupaten			
<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>29.935.300</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>63.000.000,00</b>
7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Pasirjambu	4 Lembaga Kemasyarakatan	13.905.300,00	APBD Kabupaten		4 Lembaga Kemasyarakatan	38.000.000,00
7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	10.170.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	15.000.000,00
7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	5.860.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	10.000.000,00
<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>		<b>100</b>	<b>23.910.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>90.000.000,00</b>
7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00
7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00
7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00
7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00
7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00
7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00
7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	4.350.000,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00
7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	7.500.000,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00



# PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU

## RENJA 2025

7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00
7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	6.030.000,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00
7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	6.030.000,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00
7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025	10 Keluarga	7.500.000,00
<b>7.01.04</b>	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>41.075.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>47.000.000,00</b>
<b>7.01.04.2.01</b>	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>28.280.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>22.000.000,00</b>
7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Hasil Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	7.900.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	10.000.000,00
7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	20.380.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	12.000.000,00
<b>7.01.04.2.02</b>	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>12.795.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>25.000.000,00</b>
7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	12.795.000,00	APBD Kabupaten		12 Laporan	25.000.000,00
<b>7.01.05</b>	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>97.962.483</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>129.685.000,00</b>
<b>7.01.05.2.01</b>	<b>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>97.962.483</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>129.685.000,00</b>
7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pasirjambu	100 Orang	10.000.000,00	APBD Kabupaten		100 Orang	15.000.000,00
7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Pasirjambu	100 Orang	40.000.000,00	APBD Kabupaten		100 Orang	40.000.000,00
7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Pasirjambu	400 Orang	15.695.000,00	APBD Kabupaten		400 Orang	26.350.000,00
7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	3.740.000,00	APBD Kabupaten		1 Laporan	2.000.000,00



# PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PASIRJAMBU

## RENJA 2025

7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	28.527.483,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	46.335.000,00
<b>7.01.06</b>	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>41.605.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>85.750.000,00</b>
<b>7.01.06.2.01</b>	<b>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</b>	<b>Persentase Desa yang Dibina</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>41.605.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		<b>100%</b>	<b>85.750.000,00</b>
7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	5.590.000,00	APBD Kabupaten		1 Dokumen	32.750.000,00
7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pasirjambu	12 Dokumen	6.115.000,00	APBD Kabupaten		12 Dokumen	13.000.000,00
7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pasirjambu	Dokumen	0,00	APBD Kabupaten		Dokumen	
7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pasirjambu	3 Dokumen	29.900.000,00	APBD Kabupaten		3 Dokumen	40.000.000,00
<b>JUMLAH 2</b>					<b>639.009.041,00</b>				<b>935.935.000,00</b>
<b>JUMLAH TOTAL</b>					<b>5.446.500.225,00</b>				<b>8.237.089.592,00</b>

Mengetahui,  
a.n Kepala Bappelitbangda  
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Manusia Dan Pemerintahan

**LILIS ROSTINI, S.H., M.H.**  
NIP. 19781211 200501 2 009

Verifikator,  
Fungsional Perencana Ahli Muda

**AGUNG RAHADIAN, S.IP., M.Si.**  
NIP. 19761213 201001 1 002



Pasirjambu, 20 Juni 2025  
MAT PASIRJAMBU

**NIA KANIA, S.PT., M.I.L**  
NIP. 19780927 201001 2 008



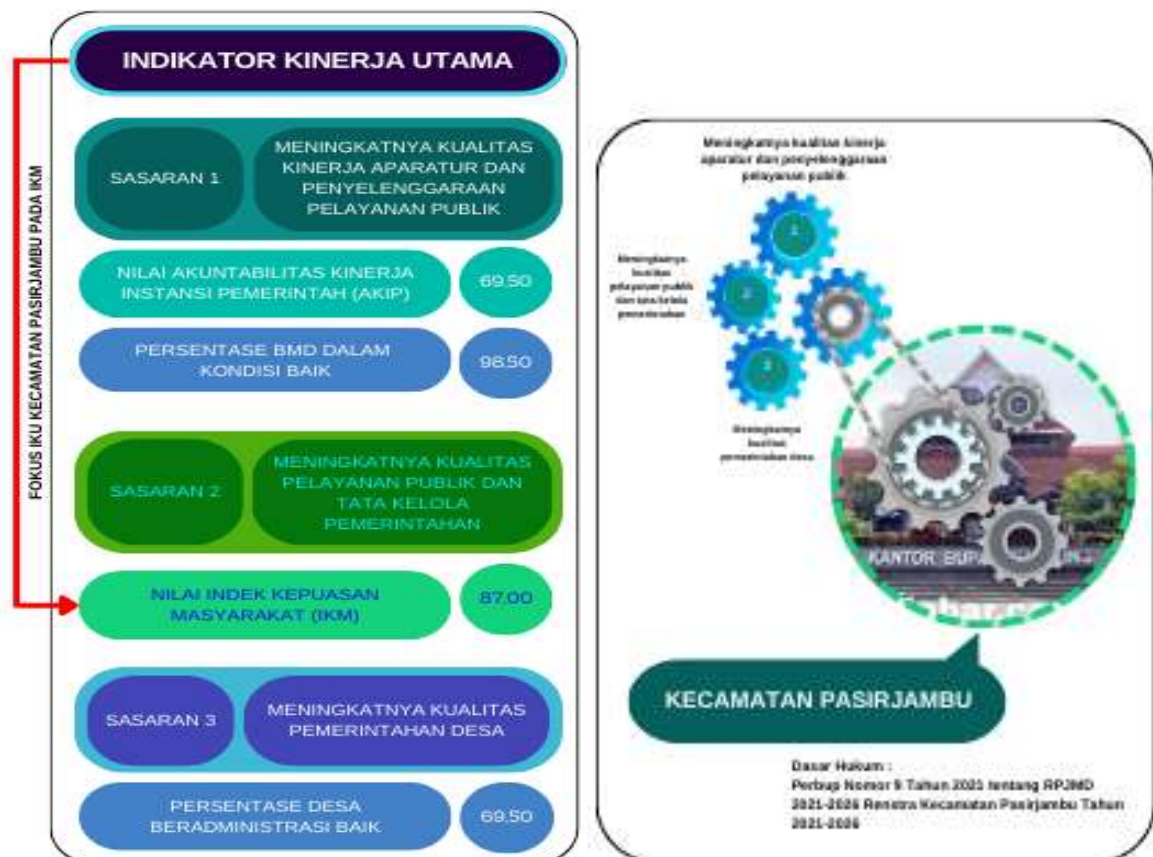
## BAB IV

## RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

## 4.1. Rencana Kerja Pencapaian Sasaran

Berdasarkan analisa kebutuhan, Kecamatan Pasirjambu menetapkan program, kegiatan dan subkegiatan dalam rangka mendukung pencapaian sasaran dalam usaha penyelesaian isu strategis. Sesuai tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu maka program dan kegiatan direncanakan untuk mendukung urusan kewilayahan yang keberhasilannya diukur dari Indikator Kinerja Utama.

Gambar 4.1  
Target Pencapaian Indikator Kinerja Utama (IKU)  
Kecamatan Pasirjambu



Untuk mencapai sasaran tersebut dibutuhkan rumusan program dan kegiatan yang dapat mendukung pencapaian sasaran. Sebelum menentukan besaran pagu anggaran yang dibutuhkan perlu ditentukan program apa yang dapat menyelesaikan isu yang berkaitan langsung dengan pelayanan Kecamatan Pasirjambu dengan ukuran keberhasilan Indikator Kinerja Utama yang telah ditentukan.

Berikut ini adalah penentuan rencana program yang akan dilaksanakan :

**Gambar 4.2**

**Rencana Program yang Akan Dilaksanakan di Tahun 2025**



**4.2. Rencana Pendanaan Perangkat Daerah**

Setelah menentukan program yang akan dilaksanakan untuk menyelesaikan isu strategis, maka dirumuskan perencanaan pendanaan untuk melaksanakan program-program yang dipilih. Total program, kegiatan, subkegiatan beserta besaran anggaran yang diusulkan dapat dilihat pada tabel berikut ini :

**Tabel 4.1**

**Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah  
Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025**

No.	Sasaran	Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcome) / Kegiatan (Output)	Rencana Tahun 2025 (Tahun Rencana)				Catatan Penting
					Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana Pagu Indikatif	Sumber Dana	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya Kualitas Kinerja Aparatur dan Penyelenggaraan Pelayanan Publik	7.01.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	1. NILAI AKIP 2. Persentase BMD Dalam Kondisi Baik	Kecamatan Pasirjambu	69,50 Point 98,50 Persen	4.807.491.184	APBD Kabupaten	
1.1		7.01.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang Disusun sesuai Ketentuan dan Tepat Waktu	Kecamatan Pasirjambu	100	35.199.000	APBD Kabupaten	
1.1.1		7.01.01.2.01.0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	6 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kabupaten	
1.1.2		7.01.01.2.01.0002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kabupaten	
1.1.3		7.01.01.2.01.0003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	3 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kabupaten	
1.1.4		7.01.01.2.01.0004	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kabupaten	
1.1.5		7.01.01.2.01.0005	Koordinasi dan Penyusunan Hasil Perubahan DPA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Kecamatan Pasirjambu	3 Dokumen	4.999.000,00	APBD Kabupaten	
1.1.6		7.01.01.2.01.0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kecamatan Pasirjambu	4 Laporan	5.000.000,00	APBD Kabupaten	
1.1.7		7.01.01.2.01.0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah					
1.1.8		7.01.01.2.01.0008	Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Penyelenggaraan Walidata Pendukung Statistik Sektoral Daerah	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	3.560.000,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
1.1.9		7.01.01.2.01.0009	Pelaksanaan Pengumpulan Data Statistik Sektoral Daerah	Jumlah Data Statistik Sektoral Daerah yang Telah Dikumpulkan dan Diperiksa Lingkup Perangkat Daerah	Kecamatan Pasirjambu	1 Data	1.640.000,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
1.2		7.01.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Keuangan yang Tepat Waktu	Kecamatan Pasirjambu	100	4.268.338.284	APBD Kabupaten	
1.2.1		7.01.01.2.02.0007	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kecamatan Pasirjambu	228 Orang/Bulan	4.253.838.284,00	APBD Kabupaten	



1.2.2		7.01.01.2.02.0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kecamatan Pasirjambu	2 Laporan	5.000.000,00	APBD Kabupaten	
1.2.3		7.01.01.2.02.0007	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan / Triwulanan / Semesteran SKPD	Kecamatan Pasirjambu	4 Laporan	4.500.000,00	APBD Kabupaten	
1.2.4		7.01.01.2.02.0008	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kecamatan Pasirjambu	4 Dokumen	5.000.000,00	APBD Kabupaten	
<b>1.3</b>		<b>7.01.01.2.03</b>	<b>Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Penyediaan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>5.000.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
1.3.1		7.01.01.2.03.0005	Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Kantor Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	5.000.000,00	APBD Kabupaten	
<b>1.4</b>		<b>7.01.01.2.05</b>	<b>Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah</b>	<b>Persentase Dokumen Pelaksanaan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Tepat Waktu</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>3.530.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
1.4.1		7.01.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan					
1.4.2		7.01.01.2.05.0006	Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	3.530.000,00	APBD Kabupaten	
1.4.3		7.01.01.2.05.0010	Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu		0,00	APBD Kabupaten	
1.4.4		7.01.01.2.05.0011	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu		0,00	APBD Kabupaten	
<b>1.5</b>		<b>7.01.01.2.06</b>	<b>Administrasi Umum Perangkat</b>	<b>Persentase Dokumen Pemenuhan Pelayanan Administrasi Umum Kantor</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>158.203.900</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
1.5.1		7.01.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Paket	12.000.000,00	APBD Kabupaten	
1.5.2		7.01.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	6 Paket	100.203.900,00	APBD Kabupaten	
1.5.3		7.01.01.2.06.0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	10 Paket	5.000.000,00	APBD Kabupaten	
1.5.4		7.01.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	20 Paket	15.000.000,00	APBD Kabupaten	
1.5.5		7.01.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Paket	6.000.000,00	APBD Kabupaten	
1.5.6		7.01.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	20.000.000,00	APBD Kabupaten	
<b>1.6</b>		<b>7.01.01.2.07</b>	<b>Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Persentase dokumen pelayanan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>10.000.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
1.6.1		7.01.01.2.07.0007	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	3 Unit	10.000.000,00	APBD Kabupaten	



1.7		7.01.01.2.08	<i>Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Persentase Laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Kecamatan Pasirjambu</i>	100	273.140.000	APBD Kabupaten		
1.7.1		7.01.01.2.08.0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat		Laporan				
1.7.2		7.01.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	18.220.000,00	APBD Kabupaten		
1.7.3		7.01.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	254.920.000,00	APBD Kabupaten		
1.8		7.01.01.2.09	<i>Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah</i>	<i>Prosentase BMD Dalam Kondisi Baik</i>	<i>Kecamatan Pasirjambu</i>	98.50	54.080.000	APBD Kabupaten		
1.8.1		7.01.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Kecamatan Pasirjambu	5 Unit	15.000.000,00	APBD Kabupaten		
1.8.2		7.01.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kecamatan Pasirjambu	5 Unit	7.500.000,00	APBD Kabupaten		
1.8.3		7.01.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi	Kecamatan Pasirjambu	2 Unit	31.580.000,00	APBD Kabupaten		
1.8.4		7.01.01.2.09.0010	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi		Unit				
<b>JUMLAH 1</b>								4.807.491.184		
2	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	7.01.02	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAN PELAYANAN PUBLIK</b>	<b>INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)</b>	Kecamatan Pasirjambu	87,00	260.404.058	APBD Kabupaten		
2.1		7.01.02.2.03	<i>Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Persentase Koordinasi Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Pelayanan Umum</i>	<i>Kecamatan Pasirjambu</i>	100	22.900.000	APBD Kabupaten		
2.1.1		7.01.02.2.03.0001	Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Jumlah Dokumen Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah dan/atau Instansi Vertikal yang Terkait dalam Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Pelayanan Umum	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	22.900.000,00	APBD Kabupaten		
2.2		7.01.02.2.04	<i>Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang Dilimpahkan kepada Camat</i>	<i>Persentase Urusan Pelimpahan kepada Camat yang Dilaksanakan</i>	<i>Kecamatan Pasirjambu</i>	100	237.504.058	APBD Kabupaten		
2.2.1		7.01.02.2.04.0001	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Pelayanan Perizinan Non Usaha	Jumlah Dokumen Non Perizinan Usaha yang Dilaksanakan	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	4.664.000,00	APBD Kabupaten		
2.2.2		7.01.02.2.04.0003	Pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang terkait dengan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Jumlah Laporan Pelaksanaan Kewenangan Lain yang Dilimpahkan	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	232.840.058,00	APBD Kabupaten		
3	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	7.01.03	<b>PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA DAN KELURAHAN</b>	<b>Persentase Capaian Program dan Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan</b>	Kecamatan Pasirjambu	100	197.962.500	APBD Kabupaten		
3.1		7.01.03.2.01	<i>Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Persentase Koordinasi Kegiatan Pemberdayaan Desa</i>	<i>Kecamatan Pasirjambu</i>	100	144.117.200	APBD Kabupaten		



3.1.1		7.01.03.2.01.0001	Peningkatan Partisipasi Masyarakat dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Berpartisipasi dalam Forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan di Desa	Kecamatan Pasirjambu	12 Lembaga Kemasyarakatan	5.000.000,00	APBD Kabupaten	
3.1.2		7.01.03.2.01.0003	Peningkatan Efektifitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Jumlah Laporan Peningkatan Efektivitas Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	139.117.200,00	APBD Kabupaten	
<b>3.2</b>		<b>7.01.03.2.03</b>	<b>Pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Kecamatan (Urusan Pemberdayaan Masyarakat Dilaksanakan oleh Kecamatan bagi Pemerintah Kota yang Tidak Memiliki Desa)</b>	<b>Persentase Lembaga Kemasyarakatan yang Terfasilitasi</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>29.935.300</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
3.2.1		7.01.03.2.03.0002	Peningkatan Kapasitas Lembaga Kemasyarakatan	Jumlah Lembaga Kemasyarakatan yang Ditingkatkan Kapasitasnya	Kecamatan Pasirjambu	4 Lembaga Kemasyarakatan	13.905.300,00	APBD Kabupaten	
3.2.2		7.01.03.2.03.0004	Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Jumlah Laporan Fasilitasi Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	10.170.000,00	APBD Kabupaten	
3.2.3		7.01.03.2.03.0005	Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Jumlah Laporan Fasilitasi Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	5.860.000,00	APBD Kabupaten	
<b>3.3</b>		<b>7.01.03.2.06</b>	<b>Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga Tingkat Kecamatan dan Kelurahan</b>	<b>Persentase capaian program dan kegiatan pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan</b>		<b>100</b>	<b>23.910.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>	
3.3.1		7.01.03.2.06.0001	Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pembentukan dan Penumbuhan Karakter Keluarga Melalui Peningkatan Kesadaran Masyarakat akan Pentingnya Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dalam Semua Aspek Kehidupan Bermasyarakat, Berbangsa, dan Bernegara	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
3.3.2		7.01.03.2.06.0002	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Membangun Kerja Sama antar-Keluarga, Warga, dan Kelompok Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
3.3.3		7.01.03.2.06.0003	Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Ketahanan Pangan Keluarga	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
3.3.4		7.01.03.2.06.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pemberdayaan Masyarakat dalam Peningkatan Penggunaan dan Pemanfaatan Sandang Produksi Dalam Negeri	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
3.3.5		7.01.03.2.06.0005	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Mewujudkan Rumah Sehat dan Layak Huni serta Kesadaran Hukum tentang Kepemilikan Rumah	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
3.3.6		7.01.03.2.06.0006	Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Pendidikan dan Keterampilan untuk Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang Berkualitas dan Berdaya Saing	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025



3.3.7		7.01.03.2.06.0007	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Derajat Kesehatan Keluarga dan Lingkungan Dengan Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	4.350.000,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
3.3.8		7.01.03.2.06.0008	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga Melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Taraf Hidup Keluarga melalui Kehidupan Berkoperasi dan Pengembangan Ekonomi Lainnya	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	7.500.000,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
3.3.9		7.01.03.2.06.0009	Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan Kesadaran Keluarga dalam Peningkatan Kualitas Kelestarian Lingkungan Hidup	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
3.3.10		7.01.03.2.06.0010	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	6.030.000,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
3.3.11		7.01.03.2.06.0011	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Rumah Tangga	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	6.030.000,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
3.3.12		7.01.03.2.06.0012	Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Jumlah Keluarga yang Mengikuti Penumbuhan dan Peningkatan Kesadaran Keluarga dalam Keterlibatan Perencanaan Kehidupan Menuju Keluarga Berkualitas	Kecamatan Pasirjambu	10 Keluarga	0,00	APBD Kabupaten	Sub Kegiatan Baru 2025
4	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	7.01.04	<b>PROGRAM KOORDINASI KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM</b>	<b>Persentase Penegakan Perda yang Berkaitan dengan Ketentraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Pasirjambu	100	41.075.000	APBD Kabupaten	
4.1		7.01.04.2.01	<b>Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	<b>Persentase Koordinasi Upaya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum</b>	Kecamatan Pasirjambu	100	28.280.000	APBD Kabupaten	
4.1.1		7.01.04.2.01.0001	Sinergitas dengan kepolisian Negara republik indonesia tentara nasional indonesia dan instansi vertikal di wilayah kecamatan	Jumlah Laporan Sinergitas dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Tentara Nasional Indonesia dan Instansi Vertikal di Wilayah Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	7.900.000,00	APBD Kabupaten	
4.1.2		7.01.04.2.01.0002	Harmonisasi hubungan dengan tokoh agama dan tokoh masyarakat	Jumlah Laporan Pelaksanaan Harmonisasi Hubungan dengan Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	20.380.000,00	APBD Kabupaten	
4.2		7.01.04.2.02	<b>Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	<b>Persentase Koordinasi Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Pasirjambu	100	12.795.000	APBD Kabupaten	
4.2.1		7.01.04.2.02.0001	Koordinasi/Sinergi Dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Jumlah Laporan Koordinasi/Sinergi dengan Perangkat Daerah yang Tugas dan Fungsinya di Bidang Penegakan Peraturan Perundang-Undangan dan/atau Kepolisian Negara Republik Indonesia	Kecamatan Pasirjambu	12 Laporan	12.795.000,00	APBD Kabupaten	
5	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dan Tata Kelola Pemerintahan	7.01.05	<b>PROGRAM PENYELENGGARAAN URUSAN PEMERINTAHAN UMUM</b>	<b>Persentase Capaian Keberhasilan Urusan Pemerintahan Umum yang Ditugaskan Kepala Daerah</b>	Kecamatan Pasirjambu	100	97.962.483	APBD Kabupaten	



5.1		7.01.05.2.01	<i>Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Umum sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Persentase Pelaksanaan Kegiatan Urusan Pemerintahan Umum Sesuai Penugasan Kepala Daerah</i>	<i>Kecamatan Pasirjambu</i>	100	97.962.483	<i>APBD Kabupaten</i>		
5.1.1		7.01.05.2.01.0002	Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Fasilitasi, Koordinasi dan Pembinaan (Bimtek, Sosialisasi, Konsultasi) Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Nasional	Kecamatan Pasirjambu	100 Orang	10.000.000,00	APBD Kabupaten		
5.1.2		7.01.05.2.01.0003	Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Persatuan dan Kesatuan Bangsa	Kecamatan Pasirjambu	100 Orang	40.000.000,00	APBD Kabupaten		
5.1.3		7.01.05.2.01.0004	Pembinaan Kerukunan Antar suku dan Intrasuku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Jumlah Orang yang Mengikuti Pembinaan Kerukunan Antar Suku dan Intra Suku, Umat Beragama, Ras, dan Golongan Lainnya Guna Mewujudkan Stabilitas Keamanan Lokal, Regional, dan Nasional	Kecamatan Pasirjambu	400 Orang	15.695.000,00	APBD Kabupaten		
5.1.4		7.01.05.2.01.0005	Penanganan Konflik Sosial Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Laporan Konflik yang Ditangani Sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	Kecamatan Pasirjambu	1 Laporan	3.740.000,00	APBD Kabupaten		
5.1.5		7.01.05.2.01.0008	Pelaksanaan Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Jumlah Dokumen Tugas Forum Koordinasi Pimpinan di Kecamatan	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	28.527.483,00	APBD Kabupaten		
6	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan Desa	7.01.06	<b>PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PEMERINTAHAN DESA</b>	<b>Persentase Desa yang Dibina dan Diawasi</b>	<b>Kecamatan Pasirjambu</b>	<b>100</b>	<b>41.605.000</b>	<b>APBD Kabupaten</b>		
6.1		7.01.06.2.01	<i>Fasilitasi, Rekomendasi dan Koordinasi Pembinaan dan Pengawasan Pemerintahan Desa</i>	<i>Persentase Desa yang Dibina</i>	<i>Kecamatan Pasirjambu</i>	100	41.605.000	<i>APBD Kabupaten</i>		
6.1.1		7.01.06.2.01.0002	Fasilitasi Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Administrasi Tata Pemerintahan Desa	Kecamatan Pasirjambu	1 Dokumen	5.590.000,00	APBD Kabupaten		
6.1.2		7.01.06.2.01.0003	Fasilitasi Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Jumlah Dokumen yang Difasilitasi dalam rangka Pengelolaan Keuangan Desa dan Pendayagunaan Aset Desa	Kecamatan Pasirjambu	12 Dokumen	6.115.000,00	APBD Kabupaten		
6.1.3		7.01.06.2.01.0006	Fasilitasi Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Jumlah Dokumen Fasilitasi dalam rangka Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa	Kecamatan Pasirjambu	Dokumen	0,00	APBD Kabupaten		
6.1.4		7.01.06.2.01.0009	Fasilitasi Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Jumlah Dokumen Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah dengan Pembangunan Desa	Kecamatan Pasirjambu	3 Dokumen	29.900.000,00	APBD Kabupaten		
<b>JUMLAH 2</b>								<b>639.009.041,00</b>		
<b>JUMLAH 1 DAN 2</b>								<b>5.446.500.225,00</b>		

Pasirjambu, 20 April 2025  
CAMAT PASIRJAMBU,  
  
**NELA HANANIA, S.P.T., M.I.L.**  
NIP. 19780927 201001 2 008



## BAB V P E N U T U P

### 5.1. Catatan Penting Dalam Penyusunan PerubahanRenja

Rencana Kerja (Renja) Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 merupakan dokumen akhir yang harus disusun oleh Kecamatan Pasirjambu dalam melaksanakan rangkaian proses perencanaan program, kegiatan dan sub kegiatan untuk melaksanakan tugas dan fungsi Kecamatan Pasirjambu dalam melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditentukan.

Renja Kecamatan Pasirjambu dapat diubah apabila berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi tidak sesuai dengan perkembangan keadaan atau penyesuaian terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat, Provinsi dan Daerah mengacu pada perubahan RKPD. Selain itu, Renja dapat diubah jika terdapat keridaksesuaian sebagaimana hasil pengendalian dan evaluasi dan/atau terjadi penyesuaian tujuan dan sasaran Kecamatan Pasirjambu beserta target indikatornya sebagaimana tertuang didalam Renstra Kecamatan Pasirjambu Tahun 2021-2026.

### 5.2 Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Penyusunan PerubahanRenja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Bandung tahun 2021-2026, Renstra Perubahan Kecamatan Pasirjambu tahun 2021-2026, Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025 dan ditindaklanjuti oleh Surat Edaran Bupati Bandung Nomor DI.03.01 / 4382 / BAPPELITBANGDA tentang Agenda Penyusunan PerubahanDokumen Perencanaan Tahun 2025. Selain itu, Penyusunan PerubahanRenja mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah serta Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Selain hal-hal diatas, Penyusunan PerubahanRenja merupakan salah satu upaya proses penajaman program, kegiatan dan pagu indikatif Kecamatan Pasirjambu yang ditetapkan pada Peraturan Bupati Bandung nomor 75 Tahun 2023 tentang RKPD Kabupaten Bandung Tahun 2025.

### 5.3 Rencana Tindak Lanjut

Renja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 merupakan pedoman untuk proses penganggaran pada tahap Rencana Kinerja dan Anggaran (RKA) Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan.

Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun 2025 merupakan pedoman untuk proses Penyusunan Perubahan penganggaran pada tahap Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon dan Prioritas Anggaran Sementara Kabupaten Bandung Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang telah direncanakan.

Demikian Dokumen Rencana Kerja Kecamatan Pasirjambu Tahun Anggaran 2025 ini kami susun dan kami menyadari masih banyak kekurangan dalam penyusunannya, namun diharapkan dengan tersusunnya Rencana Kerja 2025 ini, Kecamatan Pasirjambu dapat meningkatkan pencapaian kinerja yang signifikan dalam melaksanakan seluruh sasaran strategisnya dalam upaya mencapai dan mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kecamatan Pasirjambu yang selaras dengan Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran Kabupaten Bandung.

Pasirjambu, Juni 2025  
CAMAT PASIRJAMBU,

ttt

**NIA KANIA**

BUPATI BANDUNG,  
  
**MOHAMMAD DADANG SUPRIATNA**

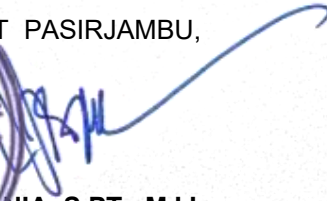
Lampiran – lampiran :

**Formulir E.70  
Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renja Perangkat Daerah  
Kabupaten Bandung**

No	Jenis kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Kesesuaian		Faktor Penyebab Ketidaksesuaian	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
		Ada	Tidak Ada		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Pembentukan Tim Penyusun Renja Perangkat Daerah dan Penyusun Agenda Kerja	√			
2	Pengolahan Data dan Evaluasi	√			
3	Analisis Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
4	Mengkaji hasil evaluasi renja-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota tahun lalu berdasarkan renstra Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
5	Penentuan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
6	Penelaahan Rancangan Akhir Perubahan RKPД Kabupaten/Kota	√			
7	Perumusan Tujuan dan sasaran	√			
8	Penelaahan usulan masyarakat	√			
9	Perumusan kegiatan prioritas	√			
10.	Pelaksanaan Forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
10.a	Menyelaraskan program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan usulan program dan kegiatan hasil musrembang kecamatan	√			
10.b	Mempertajam indikator dan target kinerja program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	√			
10.c	Mensingkronkan program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan kewenangan dan sinergitas pelaksanaan	√			
10.d	Mensesuaikan pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing perangkat Daerah Kabupaten/Kota sesuai surat edaran bupati/wali kota	√			
11	Sasaran Program dan kegiatan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota disusun berdasarkan pendekatan kinerja, perencanaan dan penganggaran terpadu	√			
12	Program dan kegiatan antar Perangkat Daerah Kabupaten/Kota dengan perangkat Daerah lainnya dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran prioritas pembangunan daerah telah dibahas dalam forum Perangkat Daerah Kabupaten/Kota				



13	Pendanaan program dan kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten/Kota telah menyusun dan memperhitungkan prakiraan maju	√			
14	Dokumen renja Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang telah disahkan	√			

Pasirjambu, Juni 2025  
KAMAT PASIRJAMBU,  
  
**NIA KANIA, S.PT., M.I.L**  
NIP.19780927 201001 2 008